

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2012**



**STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM MANDIRI PERDESAAN
DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GORONTALO
(Studi Kasus Pada PKBM Kec.Tilango Kab. Gorontalo)**

Oleh

DR. IRAWATY IGIRISA, S.Pd, M.Si / NIDN 0028097104 (Ketua)

RAMLAN AMIR ISA, SE, MM NIDN 0028087507 (Anggota)

**JURUSAN MANAJEMEN
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
SEPTEMBER 2012**

1. Judul penelitian : Studi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus pada PKBM Kec. Tilango Kab. Gorontalo).

2. Ketua Peneliti:
 - a. Nama Lengkap : Dr. Irawaty Igirisa, SPd, MSi
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 19710928 200604 2 001
 - d. Jabatan Struktural : -
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor/
 - f. Fakultas/Jurusan : FEB /Manajemen
 - g. Pusat Penelitian : LEMLIT UNG
 - h. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
 - i. Telepon/Faks : (0435) 829713
 - j. Alamat Rumah : Jalan Prof.Dr. Jhon Ario No. 74 Kota Gorontalo
 - k. Telepon/Faks/Email : (0435) 8709000 / ira.igirisa@yahoo.co.id

3. Jangka waktu penelitian : 6 (enam) bulan
4. Pembiayaan :
 - Jumlah biaya yang diajukan : Rp. 17.190.000,-

Mengetahui:

Gorontalo, September 2012

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Peneliti,

Imran R. Hambali, S.Pd.,SE.,MSA

Dr. Irawaty Igirisa, SPd, M.Si

Nip. 19700823 199003 1005

Nip. 19710928 200604 2001

Mengetahui :

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Fitryane Lihawa, MSi

NIP.19691209 199303 2001

I. Identitas Penelitian

1. Judul Usulan : Studi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus pada PKBM Kec. Tilango Kab. Gorontalo).
2. Ketua Peneliti:
 - a. Nama Lengkap : Dr. Irawaty Igirisa, SPd, MSi
 - b. Bidang keahlian : Manajemen dan Kebijakan publik
 - c. Jabatan Struktural : -
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Unit kerja : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - f. Alamat surat : Jalan Jenderal Sudirman no 6 Kota Gorontalo.
 - g. Telepon/Faks : (0435) 829713
 - h. Alamat Rumah : Jalan Prof.Dr. Jhon Ario No. 74 Kota Gorontalo
 - i. Telepon/HP/Email : (0435) 8709000 / 081356688575/ira.igirisa@yahoo.co.id
3. Anggota peneliti : Ramlan Amir Isa, SE, MM

Tim peneliti :

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi waktu (jam/minggu)
1.	Dr.Irawaty Igirisa, SPd, MSi	Manajemen dan Administrasi Publik	FEB UNG	
2.	Ramlan Amir Isa, SE, MM	Manajemen	FEB UNG	

4. Objek penelitian : Masyarakat penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
5. Masa pelaksanaan penelitian :
 - Mulai : April 2012
 - Berakhir : September 2012
6. Anggaran yang diusulkan : Rp. 17.190.000,-
7. Lokasi penelitian : Di Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo.
8. Hasil yang ditargetkan : Diharapkan dapat diketahui tahapan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan imple - mentasi kebijakan dan dampak dari Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Pengentasan kemiskinan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan izin dan kuasaNya jualah kami dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian Pengembangan Program Studi Universitas Negeri Gorontalo tahun 2012 ini. Penelitian yang telah dilakukan berjudul Studi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus pada PKBM di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo).

Dalam pelaksanaan penelitian ini kami menemukan banyak kendala dan tantangan. Namun, berkat kerja keras dan kesungguhan dari tim peneliti akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan. Melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama dalam proses pengumpulan data, pengolahan dan analisis data sampai tersusunnya laporan hasil penelitian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan kritikan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya, semoga keberadaan laporan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Amien

Gorontalo, Oktober 2012

Tim Peneliti,

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II STUDI PUSTAKA	5
2.1 Konsep administrasi public	6
2.2 Konsep kebijakan dan implementasi kebijakan public	7
2.3 Konsep kemiskinan	10
2.4 Upaya pengentasan kemiskinan	12
2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	15
3.1 Jenis dan pendekatan penelitian	15
3.2 Lokasi dan waktu penelitian	15
3.3. Sumber data	15
3.4 Instrumen Penelitian	16
3.5 Fokus dan deskripsi fokus penelitian	17

3.6 Teknik pengumpulan data	22
3.7 Teknik Pengabsahan data	23
3.8 Teknik Analisis data	24
3.9 Bagan alir penelitian	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Deskripsi lokasi penelitian	27
4.1.1 Sejarah pembentukan Kec. Tilango Kab. Gorontalo	27
4.1.2 Struktur organisasi	30
4.1.3 Penjabaran tugas dan fungsi	31
4.2 Gambaran umum PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango	34
4.3 Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan	61
4.3.1 Tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan	61
4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan	76
4.3.3 Dampak implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kec. Tilango	93
BAB V PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
1. Pedoman wawancara	104
2. Dokumentasi penelitian	107
3. Biaya penelitian	111
4. Biodata penelitian	113
5. Daftar nama informan	124
6. Surat tugas meneliti	125
7. Surat permohonan izin pengumpulan data	126
8. SK Penelitian	127
9. Rekomendasi penelitian	130
10. Daftar hadir seminar hasil penelitian	131

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk pengentasan kemiskinan melalui implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Tujuan khusus adalah untuk mengetahui dan menganalisis: a) Tahapan Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, b). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan, c). Dampak dari PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan untuk mengumpulkan data, peneliti telah menggunakan teknik obeservasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data hasil penelitian telah diolah melalui teknik: Reduksi, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada, dimulai dari sosialisasi/musyawarah di tingkat kecamatan, dan sosialisasi/musyawarah di tingkat desa untuk penggalan gagasan, musyawarah khusus perempuan, perencanaan dan penetapan prioritas usulan, dan musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban serta serah terima realisasi kegiatan. Dalam proses implementasi terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu faktor internal yang terdiri dari sumberdaya pelaksana dan sasaran kebijakan, komunikasi antara pelaksana kebijakan, dan adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan, dan faktor eksternal yang terdiri dari kondisi sosial/ekonomi masyarakat, budaya masyarakat dan pengaruh politik lokal. Dampak dari implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilihat dari adanya pembangunan fisik, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PNPM Mandiri Perdesaan dan Pengentasan Kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal, Pasca Bencana dan Generasi Sehat dan Cerdas. Khusus untuk pengembangan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan dengan dasar kebijakan Surat Keputusan Menkokesra No 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007, dan ditinjaklanjuti dengan kebijakan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dari beberapa daerah yang ada di provinsi Gorontalo, maka peneliti melihat fenomena yang terjadi di Kec. Tilango Kab. Gorontalo yang mengembangkan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pembinaan kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dari delapan desa yang ada di Kec. Tilango terdapat empat desa yang menjadi sasaran dalam PNPM Mandiri Perdesaan yang melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu PKBM Desa Lauwonu, Ilotidea, Tabumela dan Tualango.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa empat desa yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan melalui pengembangan PKBM (Diklat dan usaha produktif) mengalami tingkat keberhasilan yang berbeda. Di

desa Lauwону beberapa kelompok yang terhimpun dalam PKBM yang dibina dan diberikan dana bantuan melalui PNPM Mandiri Perdesaan mengalami keberhasilan yang cukup signifikan. Sedangkan di tiga desa lainnya yaitu desa Ilotidea, Tabumela dan Tualango kurang mengalami keberhasilan yang diharapkan.

Mencermati fenomena yang terjadi pada beberapa desa ini, peneliti menduga bahwa desa-desa yang kurang berhasil ini diakibatkan oleh ketidakmampuan pengelola PKBM dalam mengembangkan bantuan yang disalurkan melalui kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Dari beberapa program yang telah disusun untuk dilaksanakan melalui kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui program kerja PKBM yang tidak maksimal sehingga upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat belum berhasil dengan baik dan mempengaruhi perkembangan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang akan disalurkan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

Oleh karena itu, melalui kajian tentang implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan ini diharapkan dapat diketahui tahapan yang tepat dalam melaksanakan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan serta dampak dari kebijakan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kec. Tilango. Untuk itu peneliti mengkajinya melalui penelitian ilmiah dengan merumuskan judul “Studi Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kab. Gorontalo (Studi kasus pada PKBM di Kec. Tilango Kab. Gorontalo).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan?
- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan ?
- c. Bagaimanakah dampak implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Mengetahui dan menganalisis dampak implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap

implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Gorontalo.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Konsep administrasi publik.

Konsep administrasi publik di Indonesia pada dasarnya bukanlah konsep yang baru, karena konsep administrasi publik sudah ada sejak dahulu, hanya para pakar mengganti istilah administrasi publik menjadi administrasi negara (Pasolong, 2007). Perkembangan ilmu administrasi publik menjadi ilmu administrasi negara perlu mendapatkan perhatian dari aparat birokrasi. Dalam hal ini dikenal adanya istilah *Public Administration* yang selalu di alih bahasakan ke dalam Bahasa Indonesia dengan sebutan Administrasi Negara. Istilah administrasi negara dikenal berbarengan dengan pendekatan yang dipergunakan dalam mengelola negara yang menekankan pada orientasi kekuasaan. Orientasi kekuasaan yang berasal dari negara membuat segala upaya penyelenggaraan administrasi pemerintahan bercorak sarwa negara atau publik yang ditekankan pada pemahaman negara. Oleh karena itu, corak sarwa negara lebih menonjol ketimbang corak yang bersarwa masyarakat atau rakyat.

Saat ini, paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah banyak berubah. Salah satu perubahan itu ialah pendekatan yang sarwa negara berubah menjadi sarwa masyarakat (Thoha, 2008). Oleh karena itu pemahaman istilah *public* seperti yang dilekatkan sebagai predikat pada istilah *administration*

hendaknya dipahami sebagai predikat terhadap proses pemerintahan (*governance*) yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut.

Dengan demikian, istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Dimana pemahaman seperti ini pada hakekatnya merupakan jiwa dari ilmu administrasi negara yang sejak pertama kali dikembangkan dengan tujuan eksistensinya untuk melayani kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kekuasaan yang berada pada penguasa sebenarnya adalah merupakan titipan yang berdomisili pada masyarakat, dimana segala sesuatu yang menjadi kebijakan pemerintah haruslah bersumber dari aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Disamping itu, administrasi publik diartikan sebagai proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik Chandler & Plano dalam Keban (2004). Administrasi publik adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (Dimock & Dimock, 1960) dalam Pasolong (2007).

Berdasarkan konsepsi dan pendapat di atas peneliti berasumsi bahwa administrasi publik adalah keseluruhan proses kegiatan pemerintah dimana sumberdaya dan personelnnya di organisir dan di koordinir dalam melaksanakan kebijakan publik sebagai wujud implementasi kekuasaan politiknya.

2.2 Konsep kebijakan dan implementasi kebijakan publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Dunn, 1994).

Kebijakan publik (*Public policy*) menurut Thomas R Dye (1978) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk kebijakan negara mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah".

Anderson (1984) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Anderson (1984), mengklasifikasikan kebijakan/*policy* menjadi dua; yakni *substansif* dan *prosedural*. Kebijakan *substansif* yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan *prosedural* yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah merupakan suatu rumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, baik berupa peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada hakekatnya bersifat mengikat dan mengatur kehidupan suatu organisasi/negara.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu mata rantai dalam proses kebijakan, dalam hal ini berupa kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari rangkaian pentahapan dalam kebijakan publik, disamping formulasi kebijakan, penilaian kebijakan dan lain-lain (Dunn, 2004). Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Solichin (2002) merumuskan implementasi kebijakan adalah: *“Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*.

Melihat pengertian di atas, nampaklah bahwa implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Grindle (1980) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (dalam Grindle 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Relevan dengan itu, George Edwards III (1980) mengemukakan ada empat hal yang dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini apabila dapat dikondisikan dengan baik terutama aparat pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan (masyarakat) maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan akan lebih maksimal.

Dengan melihat berbagai konsepsi dan pendapat tentang implementasi kebijakan di atas, maka dapatlah ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah merupakan suatu tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dirumuskan dalam suatu program yang dapat membantu dalam pencapaian suatu tujuan. Dalam hal ini implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

2.3 Konsep kemiskinan

Fenomena kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang masa. Kemiskinan menyebabkan kualitas kehidupan seseorang terjerembab dalam limbah kesengsaraan hidup baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemiskinan menurut pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana orang-orang yang tidak memiliki harta atau memiliki kekurangan dalam hidup karena penghasilan yang sangat rendah (Badudu, 1994 : 9013)

Kemiskinan menurut Todaro dalam Yuliadi (2007 : 156) adalah fenomena sosial ekonomi yang selalu diikuti dengan persoalan kesenjangan sosial, dimana pada sisi lain ada sebagian kecil dari masyarakat yang tingkat pendapatannya relatif cukup tinggi dan ada sebagian dari masyarakat yang memiliki pendapatan yang sangat rendah.

Secara konseptual menurut Yuliadi (2007 : 157) kemiskinan disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

- a. Faktor individual. Kemiskinan dapat terjadi jika masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam meningkatkan produktivitas kerja. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang berdampak pada kurangnya pendapatan yang diterima yang secara langsung berpengaruh terhadap ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau dengan kata lain hidup dalam kekurangan (miskin).
- b. Faktor kultural. Kemiskinan terkait dengan persepsi masyarakat yang menggunakan nilai-nilai tradisional ditengah persaingan global. Kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan biasanya menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.
- c. Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Perbedaan perlakuan pemerintah terhadap sebagian kecil masyarakat dalam aktivitas pembangunan menyebabkan struktur masyarakat miskin semakin terpinggirkan dan masyarakat kaya semakin memiliki kekuasaan atau monopoli dalam kegiatan pembangunan.

2.4 Upaya pengentasan kemiskinan

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pemberian bantuan kepada masyarakat, seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi BBM, Program P2KP, pemberian beras murah dan pengobatan gratis, Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program PNPM Mandiri Perdesaan dan program lainnya yang pada dasarnya ditujukan untuk membantu masyarakat miskin.

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan ini sangat terkait dengan ketepatan dalam identifikasi target group dan target area. Target group menyangkut identifikasi mengenai kriteria dan karakteristik seseorang atau rumah tangga miskin dan daerah mana yang termasuk dalam kategori miskin. Untuk itu perlu dilakukan program yang dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan Hikmat (2004 : 15-16) menegaskan ada tiga dasar untuk melakukan perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

- a. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah kemiskinan ditingkat individual, keluarga dan komunitas.

- b. Mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah sistem organisasi.
- c. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara territorial yang berlandaskan pada kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah masyarakat desa terutama rumah tangga miskin yang sekaligus sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai dari persiapan/sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Pelaku lainnya dalam PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari aparat dan konsultan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Di tingkat desa para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Ketua TPK, Sekretaris dan Bendahara, Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM-D/K). Sedangkan di tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Penanggungjawab Operasional Kegiatan

(PjOK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal (PL), Fasilitator Kecamatan (F-Kec), Fasilitator Teknik (FT- Kec), Sentrawan Kecamatan, dan Badan Pengawas UPK (BP-UPK), serta Badan Kerjasama Antar Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus dan pendekatan kualitatif dimana peneliti mengangkat kasus pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo. Untuk itu masyarakat yang tergabung dalam PKBM di Kec. Tilango menjadi sumber data utama untuk mengungkapkan masalah implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Gorontalo.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai September 2012 di wilayah Kab. Gorontalo khususnya pada anggota masyarakat miskin yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan yang tergabung dalam PKBM dan telah menerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

3.3 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Sumber data primer terdiri dari:
 - 1). Fasilitator/Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kabupaten.

- 2). Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat Kecamatan.
- 3). Camat dan Kepala Desa yang menjadi sasaran program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
- 4). Ketua dan anggota PKBM yang memperoleh bantuan dari program PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

b. Sumber data sekunder yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

3.4 Instrumen penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dengan demikian maka perencanaan, pengambilan data, analisis dan penafsiran data, dan penulisan laporan hasil penelitian ditangani oleh peneliti sendiri. Untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut, digunakan alat bantu seperti alat perekam suara (*tape recorder*), perekam peristiwa (*camera*), alat tulis, dan pedoman observasi/wawancara.

Pengembangan instrumen penelitian berdasarkan fokus penelitian yang ada dan menjadi dasar dalam mengembangkan pedoman wawancara. Instrumen penelitian ini menjadi panduan pada saat mengambil data melalui wawancara mendalam, sehingga peneliti tidak salah dalam mengambil data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.

3.5 Fokus dan deskripsi fokus penelitian

a. Tahapan Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Pada dasarnya tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango telah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang berlaku secara nasional di seluruh Indonesia. Tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo, terdiri dari:

1). Sosialisasi dan musyawarah di tingkat kecamatan

Tahapan pertama implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sosialisasi dan musyawarah ditingkat kecamatan dan desa. Dalam kegiatan ini diadakan sosialisasi dan sekaligus musyawarah di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari desa untuk mendapatkan penjelasan tentang PNPM Mandiri Perdesaan dan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan pada setiap kecamatan.

2). Sosialisasi dan musyawarah ditingkat desa untuk penggalan gagasan.

Tahapan sosialisasi dan musyawarah ini dilaksanakan juga ditingkat desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan kaum perempuan untuk menjelaskan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini diadakan penggalan gagasan dan aspirasi dari seluruh

masyarakat terutama terkait dengan usulan program yang akan diajukan untuk dilaksanakan dan dibiayai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

3). Musyawarah Khusus Perempuan.

Tahapan ini dilaksanakan khusus untuk program perempuan. Musyawarah khusus perempuan merupakan pertemuan di tingkat desa yang hanya dihadiri oleh perempuan untuk membahas gagasan-gagasan yang berasal dari kelompok-kelompok perempuan.

4). Perencanaan dan penetapan prioritas usulan

Tahapan ini adalah merupakan lanjutan dari musyawarah ditingkat desa dan musyawarah khusus perempuan, dimana diadakan perencanaan terhadap berbagai usulan dan ditetapkan prioritas usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahap ini diadakan musyawarah antar desa untuk menentukan Prioritas Usulan adalah memilih dan menetapkan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), menyusun dan menetapkan urutan atau peringkat usulan kegiatan dari setiap desa sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati, menetapkan jadwal prioritas usulan serta waktu penyelesaian pembuatan desain dan RAB, Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kegiatan, mendapatkan umpan balik dari forum mengenai kualitas pendampingan Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan / Fasilitator Teknis Kecamatan dan pelaku-pelaku yang terlibat dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

5). Musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban serta serah terima realisasi kegiatan.

Tahapan ini adalah musyawarah ditingkat desa maupun kecamatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang realisasi dan pertanggungjawaban realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam hal ini dilaporkan realisasi dari rencana kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan, mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang digunakan, mengevaluasi hasil pekerjaannya, memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang berjalan baik saat ini, dan menyerahkan hasil pekerjaan serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut kepada masyarakat.

b. Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam proses implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Kebijakan, baik faktor dari internal maupun faktor eksternal, yang meliputi:

1). Faktor Internal

(a). Sumber daya pelaksana dan sasaran kebijakan

Sumber daya pelaksana adalah keseluruhan pelaku PNPM Mandiri baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai di Desa dan seluruh masyarakat miskin sebagai penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang berada di Kec. Tilango Kab. Gorontalo. Dalam hal ini pelaku dan sasaran PNPM Mandiri

Perdesaan yang terkait dengan penyelenggaraan kelompok-kelompok binaan PKBM dimana kegiatan utamanya adalah membantu usaha produktif dari masyarakat sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat desa.

(b) Komunikasi antara pelaksana kebijakan

Komunikasi antara aparat pelaksana kebijakan yang terdiri dari para pelaku dan sasaran PNPM Mandiri Perdesaan. Komunikasi dimaksudkan sebagai proses penyampaian semua informasi, petunjuk dan aturan pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa (masyarakat sebagai sasaran program).

(c). Adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan

Komitmen bersama adalah merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komitmen antara seluruh pelaku dan sasaran PNPM Mandiri Perdesaan untuk betul-betul melaksanakan setiap kegiatan yang dibiayai oleh PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

2). Faktor Eksternal

(a). Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat mempunyai hubungan sosial yang baik dengan tingkat ekonomi yang dapat menunjang pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

(b). Budaya masyarakat

Budaya masyarakat adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, dimana budaya ini biasanya berpengaruh terhadap pola hidup dan interaksi antara masyarakat di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

(c). Pengaruh politik lokal.

Situasi dan suhu politik lokal yang biasanya berlaku di suatu daerah turut berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Dalam hal ini berupa situasi politik lokal yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang setiap kegiatan yang telah di rencanakan dalam kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

c. Dampak implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan

Keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo dapat dilihat melalui:

1). Pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan peningkatan pendapatan

Pembangunan fisik baik berupa fasilitas dan sarana pendukung dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Pembangunan fisik ini dapat dilihat dari berbagai bangunan yang dibangun dan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat semakin baik.

Peningkatan pendapatan adalah bertambahnya pendapatan masyarakat sebagai akibat dari pemberian bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. Peningkatan

pendapat ini dapat dilihat dari kemampuan daya beli masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

3). Pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah upaya untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan yang ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki pola hidup yang selama ini dialami oleh masyarakat.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi.

Peneliti telah melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan masyarakat miskin yang menerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan khususnya masyarakat yang tergabung dalam PKBM di Kec. Tilango Kab. Gorontalo. Proses pengamatan berlangsung dari awal dimana peneliti melakukan penyusunan proposal penelitian, pada saat mengumpulkan data sampai pada waktu penyusunan laporan akhir hasil penelitian.

b. Wawancara mendalam

Wawancara telah dilakukan terhadap para informan yang terkait dan mengetahui secara langsung berbagai informasi yang diperlukan dalam

penelitian ini. Oleh karena itu telah dipilih beberapa informan yang diwawancarai secara mendalam dan dilakukan pengamatan terhadap aktivitas masyarakat, pengelola PKBM dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

c. Dokumentasi

Tahapan ini adalah tahapan mengumpulkan informasi melalui berbagai dokumen, peraturan, petunjuk teknis maupun administrasi yang dilakukan oleh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo. Berbagai informasi yang terjaring lewat dokumen-dokumen ini dijadikan sebagai pembanding utama data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara mendalam, sehingga diharapkan data yang disajikan tepat dan akurat.

3.7 Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan untuk mengecek kembali terhadap data yang telah diperoleh maupun data yang diharapkan akan diperoleh untuk melengkapi data hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu teknik pengabsahan data dilakukan dengan cara:

a. Perpanjangan pengamatan.

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan guna melihat fenomena yang terkait dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna meyakinkan peneliti

terhadap data hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan apabila diperlukan terhadap data-data yang dianggap kurang akurat untuk memastikan bahwa data hasil penelitian tepat dan akurat.

b. Peningkatan ketekunan penelitian dalam pengamatan dan wawancara.

Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara mendalam guna meneliti data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Fokus penelitian dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengamatan dan wawancara, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

c. Fokus Group Discussion (FGD).

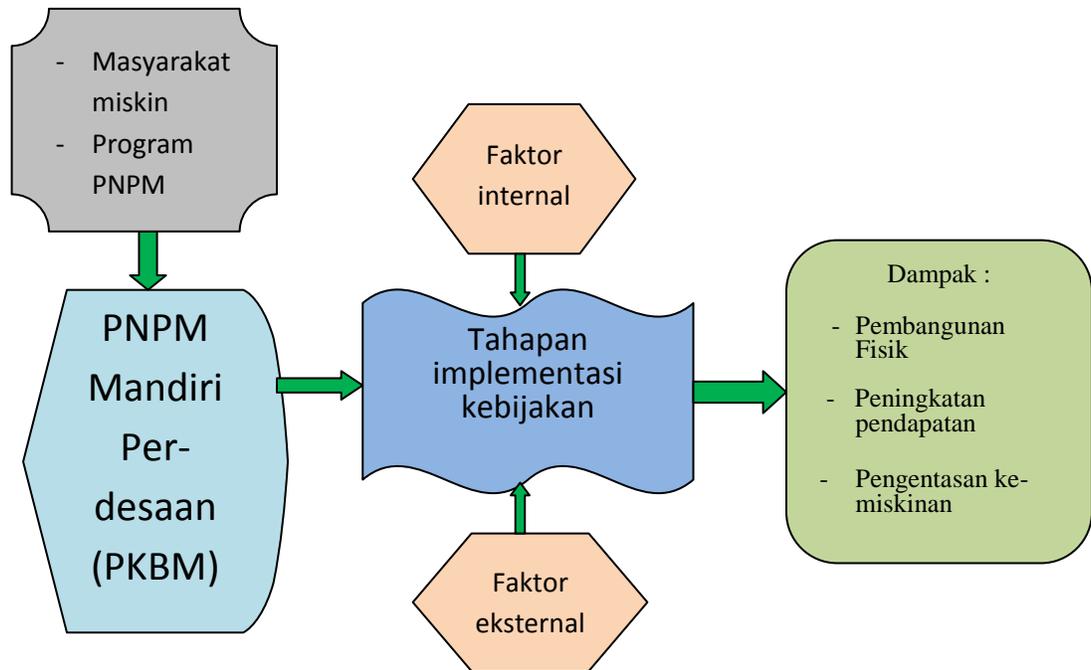
FGD dilakukan dengan cara mempertemukan beberapa informan yang terkait guna mengecek kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh para informan sebelumnya. Melalui FGD ini diharapkan data hasil penelitian sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh informan maupun fakta yang diamati oleh peneliti. Dengan demikian, data hasil penelitian tidak diragukan lagi kebenarannya.

3.8 Teknik analisis data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori hasil studi pustaka. Relevan dengan itu, Miles & Huberman (1994) dalam Sugiono (2007 : 50) menawarkan teknik analisis data dapat dilakukan melalui:

- a. Mereduksi data untuk kepentingan penyederhanaan data dalam rangka lebih mempertajam data yang dibutuhkan.. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisir data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diferivikasi atau dicek kembali kebenaran informasi yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Menyajikan data secara terorganisir dan sistematis, sehingga membentuk satu komponen yang utuh dan terpadu. Dalam kegiatan ini dilakukan penyajian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan bagan/skema.
- c. Melakukan interpretasi data sebagai langkah penentuan dalam penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti dari data yang tercatat dan disajikan. Tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang saling terkait dan sangat menentukan dalam proses analisis data kualitatif.

3.9 Bagan Alir Penelitian



Gambar 1 : Bagan alir penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi lokasi penelitian

4.1.1 Sejarah Pembentukan Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

Kemajuan Kec. Telaga telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Hal ini mengakibatkan beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak tahun 2006 seluruh elemen masyarakat dari 7 (tujuh) desa yang berada diwilayah Kec. Telaga (Tenggela, Lauwonu, Ilotidea, Tabumela, Tilote, Dulomo dan Tualango) bertekad untuk membangun gagasan pembentukan kecamatan baru yang merupakan pemekaran Kec. Telaga. Hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan unsur masyarakat lainnya telah melakukan rembuk bersama untuk menindaklanjuti gagasan dimaksud dengan membentuk Panitia Pemekaran Kecamatan. Setelah memenuhi persyaratan pemekaran, panitia

menindaklanjuti dengan menyusun Proposal Pemekaran Kecamatan yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo.

Untuk lebih memacu semangat pemekaran wilayah, maka panitia bersama seluruh lapisan masyarakat diwilayah calon kecamatan pemekaran melaksanakan Deklarasi Pembentukan Kecamatan “Telaga Harapan” pada bulan Desember 2006. Aspirasi dan gagasan pembentukan kecamatan baru sebagai pemekaran dari Kecamatan Telaga inipun mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun perjuangan rakyat untuk pemekaran kecamatan akhirnya menuai hasil, dimana Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kec. Tilango. Pengresmian Kec. Tilango oleh Bupati Gorontalo dilaksanakan oleh Bupati Gorontalo pada tanggal 28 Desember 2007 yang kemudian diikuti oleh Pelantikan Pejabat Camat Tilango yaitu Bapak Nasir Latawa, SPd yang melaksanakan tugasnya sampai tahun 2009. Selanjutnya digantikan oleh Hi. Irham Djafar Maku, MH tahun 2009 dan Drs. Abd Azis K Hasan MSi sejak 03 Maret 2012 sampai sekarang.

Kecamatan Tilango merupakan kecamatan yang terletak di bagian Timur dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 3,93 KM² dan jumlah Penduduk 12.894 jiwa (3.404 KK). Batas wilayah Kec. Tilango terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Telaga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Kota Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Duingi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Limboto.

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kec. Tilango mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, mengelola fasilitas umum, mengembangkan roda perekonomian dan usaha daerah serta tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan kepada kecamatan. Oleh karena itu perlu ditetapkan Visi dan Misi Kec. Tilango, yaitu:

VISI: Terwujudnya Kec. Tilango yang Bersih, Hemat, Aman, Sejahtera, Indah dan Lestari (BERHASIL).

MISI:

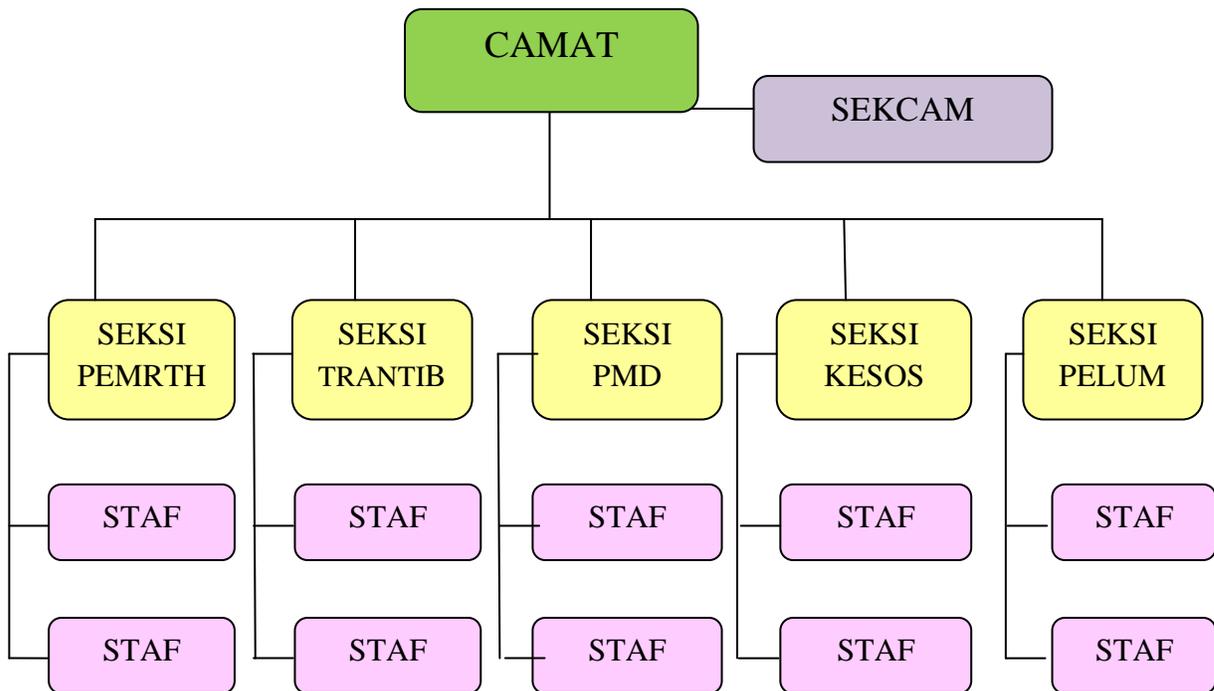
1. Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan teknis serta administrasi aparat kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan di tingkat kecamatan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan aparat kecamatan dalam bidang administrasi kependudukan, catatan sipil, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial dan perijinan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bidang kebersihan, pelestarian lingkungan hidup, kamtibmas, hokum dan perpajakan (PBB).

4.1.2 Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi dengan segala aktivitasnya, meliputi hubungan diantara orang yang menjalankan aktivitas tersebut. Makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi makin kompleks juga hubungan tersebut termasuk hubungan antara masing-masing dengan struktur organisasi. Dalam suatu organisasi, yang menjadi dasar adanya hubungan tersebut adalah pembagian kekuasaan (*Authority*) dan tanggung jawab (*Responcibility*).

Berikut ini adalah struktur organisasi Kantor Camat Tilango Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

Gambar 2 : Struktur Organisasi Kantor Camat Tilango Kab. Gorontalo



Sumber : Kantor Camat Tilango Kab. Gorontalo tahun 2012

4.1.3 Penjabaran Tugas Dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang masing – masing bagian pada kantor camat Tilango, di perlukan penjabaran yang jelas. Berikut deskripsi tugas dan fungsi yang ada pada Kantor Camat Tilango Kabupaten Gorontalo.

1. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan Pembinaan Administrasi dan memberikan Pelayanan teknis Administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Kantor Camat Tilango Kabupaten Gorontalo.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.
- b. Penyusunan Anggaran dan penatausahaan serta penyusunan pertanggungjawaban Keuangan.
- c. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan Rumah Tangga.

2. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum, Pembinaan keagrariaan, Pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri, administrasi Kependudukan serta Pembinaan Pemerintahan Desa. Memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan Penyusunan Program serta Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa.

- b. Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - c. Penyiapan bahan dan Penyusunan Program serta Pembinaan Penyelenggaraan Sosial Politik, Idiologi, Negara Kesatuan Bangsa.
 - d. Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan keagrariaan.
 - e. Pengolahan Data dan Evaluasi Data dibidang Pemerintahan.
 - f. Pelayanan Masyarakat dibidang pemerintahan.
3. Seksi pemberdayaan masyarakat desa.

Mempunyai tugas melakukan Pembinaan Masyarakat dibidang sarana dan prasarana, Perekonomian, Produksi dan Distribusi serta Pembinaan Lingkungan Hidup.

Fungsi Seksi ini adalah :

- a. Pembinaan Pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian, produksi distribusi.
- b. Pembinaan Perekonomian yang meliputi perbankan, Perkreditan Rakyat, Perkoprasian, Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan, usaha informal dan Kehutanan serta peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi.
- c. Pembinaan lingkungan hidup.
- d. Pengolahan data dan evaluasi data dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Pelayanan Masyarakat dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
- f. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Pemberdayaan Masyarakat.

4. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas melakukan Urusan Pelayanan Umum yang meliputi Pelayanan Kekayaan dan Inventarisasi Desa. Dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan Pelayanan Kekayaan dan Inventarisasi Desa
- b. Pembinaan Pelayanan Kebersihan, Keindahan, Paetanaman dan Sanitasi Lingkungan.
- c. Pembinaan Sarana dan Prasarana fisik Pelayanan Umum
- d. Pembinaan Pelayanan Perizinan.
- e. Penyelenggaraan rapat – rapat dinsa dan upacara.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas mengkoordinasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial.

Mempunyai fungsi penyiapan bahan dan penyusunan program penyelenggaraan:

- a. Pembinaan Pelayanan dan bantuan sosial, Pembinaan Kepemudaan, Peranan Wanita dan Olah Raga.
- b. Pembinaan kehidupan beragama, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan Masyarakat.
- c. Pengolahan Data dan Evaluasi data Bidang Kesejahteraan Sosial
- d. Pelayanan Masyarakat dibidang Kesejahteraan Sosial
- e. Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Kesejahteraan Sosial.

6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

Mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta Pembinaan Polisi Pamong Praja. Mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan pembinaan Aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja
- c. Pengolahan Data dan Evaluasi Data di bidang Ketentraman dan Ketertiban Wilayah.
- d. Pelayanan Masyarakat dibidang Ketentraman dan Ketertiban Wilayah.
- e. Penyelenggara Kegiatan Administrasi Perlindungan Masyarakat.

4.2 Gambaran Umum PNPM di Kec. Tilango Kab. Gorontalo

Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya yang terdiri dari aparat dan konsultan di tingkat desa, kecamatan, dan seterusnya lebih berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa terdiri Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Ketua TPK, Sekretaris Bendahara, Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM-D/K) dengan tugas sebagai berikut:

1. Kepala desa

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan badan atau forum kerjasama antar desa.

Kepala desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat di wilayahnya,
- b. Mewakili desanya dalam urusan kerjasama antar desa di dalam MAD
- c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan hasil pendataan RTM setiap dusun
- e. Membantu dan mendorong adanya MMDD dan proses penyusunan RPJMDes serta tahapan pelaksanaan lainnya di tingkat desa,
- f. Turut menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

- g. Memeriksa setiap laporan, termasuk laporan penyelesaian akhir kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik fisik, administrasi dan keuangan,
- h. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan seperti: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SF-Kab), dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K).

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD atau sebutan lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

BPD memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa,
- b. Memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya
- c. Mengusulkan, merumuskan dan menyetujui peraturan-peraturan desa (perdes) yang mendukung pelestarian manajemen pembangunan partisipatif dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahnya,
- d. Mengusulkan dan menyetujui keputusan desa untuk bergabung dalam BKAD
- e. Memberikan saran-saran perbaikan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di forum-forum resmi di desa atau di kecamatan,

f. Membangun kerjasama yang sinergis dengan kepala desa dalam rangka mensukseskan keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai ketentuan yang berlaku:

3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK terdiri dari Ketua sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di lapangan dan pengelolaan administrasi serta keuangan program. Sekretaris dan Bendahara membantu Ketua TPK terutama dalam masalah administrasi dan keuangan. Jika memang diperlukan, TPK dapat menambah tenaga atau anggota sesuai bidang kegiatan yang diperlukan. Tambahan anggota atau tenaga dapat dipilih pada saat musyawarah desa informasi hasil musyawarah antar desa penetapan usulan.

TPK terdiri dari Ketua TPK, Sekretaris, dan Bendahara tentu dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

Tugas dan Tanggung jawab TPK adalah :

- a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan secara terbuka dan melibatkan masyarakat, dalam hal : (1) pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan, (2) penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya, (3) pembuatan rencana dan pelaksanaan proses

- pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan, (4) memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari RTM, (5) pemeriksaan hasil kerja, penerimaan bahan dan mengajukan sertifikasi untuk mendapat persetujuan pembayaran dari Fasilitator Kecamatan, (6) pengawasan dan pengendalian kualitas pekerjaan, (7) pembuatan laporan bulanan,
- b. Menyelenggarakan musyawarah desa yang diperlukan termasuk musyawarah dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan,
 - c. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM Mandiri Perdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan di papan informasi,
 - d. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan melalui pertemuan musyawarah desa,
 - e. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) bersama PJOK.
 - f. Membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- 1). Ketua TPK

Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa. Tugas dan tanggung jawabnya ketua TPK adalah :

- a. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa
- b. Menjelaskan maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat
- c. Memeriksa dan menandatangani rencana kerja detail dan RPD
- d. Memeriksa dan menandatangani hasil sertifikasi setiap tahapan kegiatan bersama F-Kec
- e. Memimpin TPK dalam rapat perencanaan, pra pelaksanaan dan evaluasi.
- f. Memeriksa buku kas umum dan mendorong penyelenggaraan administrasi yang tertib dan transparan.
- g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Revisi hasil musyawarah desa, jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana.
- h. Menandatangani berkas-berkas penarikan dan pencairan dana.
- i. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan.
- j. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Buku Kas Umum, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SF-Kab), Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K),
- k. Mendorong setiap kelompok penerima manfaat untuk bertanggung jawab dalam operasional dan pemeliharaan kegiatan yang sudah dibangun atau dikerjakan
- l. Mempelajari dan menanggapi terhadap catatan F-Kec di Buku Bimbingan, meneruskan bimbingan kepada anggota TPK yang bersangkutan,

- m. Wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan audit PNPM Mandiri Perdesaan

2). Sekretaris TPK memiliki tugas :

- a. Membantu Ketua TPK dalam melaksanakan tugas-tugas administratif
- b. Mengisi formulir, membuat surat serta administrasi lain yang diperlukan oleh TPK
- c. Menyajikan informasi tentang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan laporan penggunaan dana kepada masyarakat melalui papan informasi,
- d. Memperbarui informasi dan laporan penggunaan dana yang ditempel dalam papan informasi
- e. Mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh dokumen dan berkas administrasi PNPM Mandiri Perdesaan,
- f. Menghitung HOK dan besarnya insentif berdasarkan daftar hadir pekerja dari mandor atau kepala kelompok
- g. Membantu Ketua TPK dalam pengisian format Laporan Bulanan,
- h. Memelihara / menjaga semua arsip.
- i. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh F-Kec
- j. Membuat catatan seluruh aktifitas dan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

3). Bendahara TPK memiliki tugas :

- a. Menyimpan dan menjaga uang kas kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

- b. Menyiapkan kuitansi-kuitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
 - c. Melaksanakan pembayaran insentif langsung kepada pekerja/masyarakat dan pembayaran bahan kepada suplier setelah diketahui dan disetujui oleh Ketua TPK,
 - d. Melaksanakan pencatatan pada Buku Kas Umum setiap penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan penggunaannya dan aturan yang telah ditetapkan,
 - e. Membantu Ketua TPK membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
 - f. Melengkapi LPD dengan semua bukti-bukti pembayaran dan nota penerimaan barang,
 - g. Menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pengambilan dana PNPM Mandiri Perdesaan,
 - h. Menyiapkan data-data keuangan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai bahan pembuatan laporan bulanan oleh Ketua TPK,
 - i. Menjaga dan memelihara arsip semua tanda bukti pembelian dan pembayaran
 - j. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh F-Kec
4. Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran TPU adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah desa khusus perempuan. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan

jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU melakukan bersama-sama KPM-D/K dan/ atau pengurus kelompok pengusul.

Tugas dari tim penulis usulan adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan menyiapkan data-data pendukung seperti; peta desa, jumlah penduduk termasuk penduduk miskin, hasil pendataan RTM dll
- b. Menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dan lampiran-lampiran lain yang menjadi persyaratan usulan,
- c. Melakukan kunjungan ke lokasi usulan kegiatan dan penerima manfaat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang rencana kegiatan yang diusulkan, termasuk melakukan survei dan pengukuran jika memang diperlukan,
- d. Memastikan nilai dan bentuk swadaya yang akan diberikan masyarakat untuk usulan kegiatan yang diajukan ke MAD
- e. Menuliskan data-data yang telah didapat dan mengisi formulir-formulir penulisan usulan yang disediakan berdasarkan data-data tersebut.
- f. Menyusun formulir-formulir penulisan usulan beserta lampiran yang disyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkan ketentuan yang ada dalam PNPM Mandiri Perdesaan,
- g. Bersama F-Kec atau FT-Kec melakukan survei harga sebagai dasar pembuatan dan/atau penyempurnaan RAB.
- h. Bersama F-Kec atau FT-Kec melakukan survei dan pengukuran di lokasi kegiatan.

- i. Dibantu F-Kec dan FT-Kec menyempurnakan usulan yang mendapatkan ranking atas pada waktu MAD prioritas usulan, yaitu penyempurnaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis.

5. Tim Pemantau

Tim pemantau adalah warga masyarakat yang secara sukarela menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). Pembiayaan kegiatan pemantauan berasal dari swadaya masyarakat yang dibahas melalui musyawarah desa.

Tugas dan Tanggung jawab Tim Pemantau adalah :

- a. Memantau dan membantu penyebarluasan informasi termasuk pembaharuan papan informasi
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi TPK
- c. Memantau dan mengawasi penyelenggaraan musyawarah pertanggung jawaban dan serah terima
- d. Memantau dan memeriksa setiap penarikan dana dari UPK serta setiap transaksi pembayaran/pengeluaran dana dari TPK
- e. Memantau dan memeriksa bahan dan alat yang dibeli atau disewa. Pemantauan bukan hanya menyangkut volume tetapi juga kualitasnya.

- f. Memeriksa proses pengadaan bahan dan alat, termasuk surat-surat penawaran dan perjanjian maupun mengunjungi toko-toko atau lokasi sumber bahan yang dibeli.

6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM-D/K)

KPM-D/K (KPM-D/K) adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat tentunya peran dan tugas membantu pengelolaan pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu.

Jumlah KPM-D/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan dan RTM. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para kader-KPM-D/K. Selanjutnya kader masyarakat sebagai tenaga teknik juga perlu dibentuk dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/ atau pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat.

Secara umum tugas dan tanggung jawab KPM-D/K adalah :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawarah dusun,
- b. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data pendukung lainnya,
- c. Menyebarkan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa.

- d. Memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian.
- e. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian.
- f. Mengikuti pertemuan bulanan dengan PL yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan (F-Kec), untuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- g. Membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa.
- h. Mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun
- i. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.
- j. Mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah desa kepada masyarakat

Sedangkan pelaku PNPM di tingkat kecamatan terdiri dari Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal (PL), Fasilitator Kecamatan (F-Kec), Fasilitator Teknik (FT-Kec), Setrawan Kecamatan, Badan Pengawas UPK (BP-UPK), Badan Kerjasama Antar Desa.

Deskripsi fungsi dan tugas dari masing – masing bagian tersebut adalah :

1. C a m a t

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada desa-desa di kecamatan. Selain itu Camat juga bertugas untuk menetapkan usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam MAD untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

Tugas dan tanggung jawab camat diantaranya :

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan
- c. Menyelenggarakan MAD
- d. Bersama F-Kec dan PjOK mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan
- e. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa
- f. Membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yang timbul di wilayahnya,
- g. Melayani urusan administratif, antara lain : menandatangani surat penetapan tim verifikasi, pengurus UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan

(SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dll

- h. Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir,
- i. Menilai kinerja program di Desa dan kecamatan,
- j. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan.

2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

Tugas dan Tanggung jawab PJOK adalah :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan F-Kec dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya,
- b. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian,

- c. Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantau proses pencairannya,
 - d. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama F-Kec dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya,
 - e. Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ke TK. PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat,
 - f. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi,
 - g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK ,
 - h. Bersama F-Kec memfasilitasi pelaksanaan MAD
 - i. Memantau dan/atau memfasilitasi kegiatan musyawarah desa di wilayahnya
3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.

Tugas dan tanggung jawab UPK adalah:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan,

- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,
- d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir dari BLM yang dialokasikan untuk kegiatan UEP, maupun sumber dana lain dari program pemerintah dan swasta.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program.
- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan Pada MAD
- i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada MAD sesuai dengan kebutuhan . Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan.

- k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa.
 - l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.
 - m. Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.
 - n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat.
 - o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
 - p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
 - q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan
4. Tim Verifikasi (TV)

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan pelatihan ketrampilan masyarakat

sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam musyawarah desa perencanaan usulan. Peran tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada MAD sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi adalah :

- a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing desa,
- b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan,
- c. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan
- d. Menyampaikan usulan kegiatan kepada F-Kab agar dilakukan pemeriksaan kembali,
- e. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan
- f. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD

5. Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses diskusi MAD, serta memberikan masukan / saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.

Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengamat adalah :

- a. Hadir dalam MAD untuk mewakili kecamatan bukan mewakili desanya masing-masing.

- b. Mengamati proses diskusi MAD prioritas usulan dan penetapan usulan serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.
 - c. Menyampaikan hasil pengamatan proses diskusi sebagai masukan menjelang proses pengambilan keputusan dalam MAD dan ikut menyebarkan hasil kesepakatan musyawarah kepada warga kecamatan.
 - d. Membantu mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi antara lain desa yang kecewa karena usulannya tidak lolos dalam diskusi MAD.
6. Pendamping Lokal (PL)

PL adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu F-Kec dan FT-Kec untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu orang PL.

Tugas dan Tanggung jawab adalah :

- a. Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas dari F-Kec bersama FT-Kec.
- b. Membantu F-Kec dan FT-Kec dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan di lapangan.
- c. Membantu F-Kec dalam melakukan bimbingan pada KPM-D/K mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi dan manajemen.

- d. Membantu F-Kec dan FT-Kec dalam melaksanakan pelatihan kepada TPK dan masyarakat.
- e. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun non teknis kepada Tim Pengelola Kegiatan.
- f. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT-Kec dan membantu dalam pembuatan gambar desain dan gambar purna laksana.
- g. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai cara-cara menjaga kelestarian lingkungan.
- h. Memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara administrasi, pembukuan serta pengarsipan Tim Pengelola Kegiatan.
- i. Membantu dan membimbing Tim Pengelola Kegiatan dalam penyiapan serta proses pra audit.
- j. Mengumpulkan informasi tentang aspek non teknis antara lain : partisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada F-Kec.
- k. Membimbing KPM-D/K dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat.
- l. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangan dan pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.

7. Fasilitator Kecamatan (F-Kec)

F-Kec merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPM-D/K atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan.

Tugas dan Tanggung jawab F-Kec adalah :

- a. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan
- b. Memfasilitasi KPM-D/K dalam pendataan RTM
- c. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan.
- d. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan
- e. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPM-D/K, PL, Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/UPK, Tim Penulis Usulan, Tim Pengawas dll.)
- f. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintahan lokal baik di desa dan antar desa (BPD, Kepala desa, aparat kecamatan, dll.)
- g. Memfasilitasi pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

- h. Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya.
- i. Memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana).
- j. Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan
- k. Mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat
- l. Mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan
- m. Membantu Pendamping UPK dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam.
- n. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri
- o. Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa
- p. Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada F-Kab dengan tembusan ke camat u.p. PjOK
- q. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan

- r. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan
 - s. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
 - t. Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan melalui kegiatan review terhadap pengelolaan kas dan rekening
 - u. Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI kepada F-Kab
8. Fasilitator Teknik (FT-Kec)

FT-Kec merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPM-D/K atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan khususnya dalam bidang teknik,.

Tugas dan Tanggung jawab FT-Kec adalah :

- a. Membantu dan memberikan bimbingan kepada seluruh KPM-D/K khususnya di bidang teknis
- b. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan masyarakat/desa
- c. Memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti: gedung sekolahan, bangunan tempat pelayanan kesehatan)

- d. Membantu dan memberikan bimbingan dalam membuat desain teknis, gambar konstruksi, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan
- e. Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya.
- f. Memberikan pelatihan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat yang akan mengerjakan pelaksanaan kegiatan prasarana
- g. Melakukan review RKTL dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan.
- h. Membantu FT-Kab dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta membuat sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana
- i. Memfasilitasi pembentukan tim pemelihara kegiatan sejak awal pengajuan usulan dan memberikan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana yang dibangun
- j. Membantu menghubungkan dengan pihak lain baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan prasarana yang ada baik di wilayah kecamatan maupun kabupaten

- k. Tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dengan kegiatan prasarana
 - l. Melaporkan progres masalah yang berkaitan dengan bidang tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan
 - m. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan
 - n. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin
 - o. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
9. Setrawan Kecamatan

Setrawan Kecamatan diutamakan pegawai negeri sipil dilingkungan kecamatan yang dibekali dengan kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Dalam hal tertentu, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dapat ditugaskan.

Tugas dan tanggung jawab Setrawan Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyebarkan dan mensosialisasikan pembangunan partisipatif kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan

- b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan
- c. Memandu proses musrenbang kecamatan
- d. Memberikan informasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam musrenbang desa
- e. Mendorong kerjasama antara masyarakat dengan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan
- f. Mendampingi utusan kecamatan dalam musrenbang kabupaten
- g. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan pembangunan sesuai dengan mekanisme pembangunan regular (Undang-undang No. 25 Tahun 2004)
- h. Memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah desa.
- i. Memfasilitasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat baik untuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun peningkatan kapasitas pemerintahan desa.
- j. Memfasilitasi penyusunan perdes yang partisipatif
- k. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri.
- l. Melakukan koordinasi dengan setrawan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan
- m. Mensosialisasikan hasil musrenbang kabupaten ke masyarakat dan aparat desa dan kecamatan
- n. Menyampaikan laporan bulanan di lokasi tugas tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada setrawan kabupaten

10. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK adalah badan yang ditetapkan oleh MAD Prioritas Usulan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari, Tugas dan Tanggung jawab BP - UPK adalah :

- a. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK.
- b. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan
- c. Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran.
- d. Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK
- e. Memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK.
- f. Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.
- g. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada forum MAD

11. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK,

sarana-prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berfungsi untuk melakukan tugas pokok sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, serta program-program dari pihak ketiga. Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan program PPK (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statuta dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan.

Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang *micro finance*, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.

4.3. Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan

Setelah melakukan penelitian tentang studi implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo, maka peneliti dapat memberikan deskripsi hasil penelitian dan melakukan pembahasan sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.

Deskripsi hasil penelitian adalah sebagai berikut:

4.3.1 Tahapan Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

Tahapan implementasi dalam sebuah kebijakan adalah merupakan tahapan merealisasikan rencana kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Pada

umumnya implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Tim Koordinator Pusat PNPM Mandiri Perdesaan.

Deskripsi tahapan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo, terdiri dari:

a. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat Kecamatan.

Musyawarah dan Sosialisasi Antar Desa (MAD Sos) adalah suatu musyawarah di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil dari desa-desa untuk mendapatkan penjelasan tentang PNPM Mandiri Perdesaan dan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Pada pertemuan ini perlu ditekankan bahwa masyarakat diminta untuk menyampaikan usulan kegiatan dengan mekanisme musyawarah berjenjang dan partisipatif.

Kegiatan Sosialisasi dan musyawarah ini di pandu oleh Fasilitator Kecamatan dan di dampingi oleh Konsultan Kabupaten. Kegiatan ini di hadiri oleh seluruh elemen masyarakat diantaranya Camat dan staf terkait, Wakil dari seluruh instansi sektoral kecamatan (ISK), Kades di lingkungan kecamatan, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil Rumah Tangga Miskin (RTM) dari setiap desa, Wakil perempuan dari setiap desa, Komite sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas), Tokoh masyarakat, Tokoh agama, anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

Dalam melaksanakan tahapan sosialisasi dan musyawarah maka perlu komitmen bersama untuk melaksanakan setiap tahapan ini dengan sebaik-bainya. Hal ini senada dengan informasi yang disampaikan oleh ketua UPK Kec. Tilango, bahwa:

Pada awal kegiatan memang diadakan sosialisasi dan sekaligus musyawarah dengan perwakilan dari setiap desa yang ada di Kec. Tilango. Kegiatan ini tentu melibatkan semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang ada baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan (IN, 27-08-2012).

Informasi yang sama disampaikan juga oleh Fasilitator/Konsultan Kabupaten, bahwa:

Sebelum kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di dahului oleh sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan ditingkat kecamatan dan desa, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Disamping itu, diharapkan diperoleh masukan dari masyarakat terkait kegiatan yang dapat diajukan dan di danai oleh masing-masing desa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam menetapkan usulan kegiatan oleh masing-masing desa yang ada di suatu kecamatan (HM, 31-07-2012).

Dari hasil pengamatan peneliti, tahapan sosialisasi dan musyawarah di tingkat kecamatan ini telah dilaksanakan dengan merujuk pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ada. Sosialisasi dan Musyawarah tingkat kecamatan biasanya dilaksanakan pada bulan Pebruari atau Maret pada tahun berjalan, dimana seluruh elemen masyarakat perwakilan dari masing-masing desa dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hadir dan memberikan masukan. Ketidak hadiran perwakilan desa pada kegiatan ini akan berpengaruh pada penentuan pembiayaan kegiatan yang di usulkan oleh desa yang

bersangkutan. Hal ini tentu akan menentukan keberhasilan tahapan implementasi kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kab. Gorontalo.

Relevan dengan itu, teori yang disampaikan oleh George Edward III (1980) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi dalam suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Demikian juga dengan komunikasi yang terjadi dalam kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan alur komunikasi yang telah ditetapkan dalam PTO.

Salah satu sarana komunikasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah musyawarah dan sosialisasi yang diadakan ditingkat kecamatan. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan baik, apabila para pelaku dan masyarakat sebagai sasaran PNPM Mandiri Perdesaan dapat memainkan perannya dengan baik.

Dari hasil pengamatan peneliti, proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan telah berlangsung melalui tahapan sosialisasi dan musyawarah ditingkat kecamatan. Pada tahapan ini, disamping penyampaian informasi tentang kegiatan yang akan di danai oleh PNPM Mandiri

Perdesaan, juga dapat dijaring aspirasi dari seluruh masyarakat sesuai dengan kondisi dari masing-masing desa yang ada di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

Informasi yang disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan di Tilango menjelaskan bahwa:

Kegiatan sosialisasi dan musyawarah telah dilakukan dengan mengundang perwakilan dari masyarakat diseluruh desa yang ada di Kec. Tilango dan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. Forum ini adalah awal dan titik tolak dimulainya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Hadir dalam kegiatan ini juga wakil-wakil dari PKBM dimana ada sebagian yang menjadi sasaran penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. (TR, 27-08-2012).

Senada dengan itu, penjelasan yang disampaikan oleh salah seorang ketua PKBM yang berada di Desa Lauwonu bahwa:

Kami dari PKBM sebagai wakil dari masyarakat selalu dilibatkan pada musyawarah ditingkat kecamatan. Bahkan PKBM kami telah menerima bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2007 dan 2008 yang penggunaannya ditujukan untuk membangun gedung PKBM di desa Lauwonu ini. Kami dimintakan informasi juga tentang kegiatan yang akan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango (RK, 31-07-2012).

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa tahapan musyawarah dan sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah berlangsung dengan baik. Dengan demikian, kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan dapat berhasil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tujuan akhir pengentasan kemiskinan dapat dicapai dengan maksimal.

b. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat desa untuk penggalian gagasan

Tahapan sosialisasi dan musyawarah di tingkat kecamatan dilanjutkan sampai ke tingkat desa untuk menggali gagasan dari masyarakat terkait dengan program yang akan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Pada tahap ini seluruh perwakilan dari masyarakat diundang dan hadir untuk mendengarkan penyampaian informasi tentang pelaksanaan PNPM dan diharapkan gagasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing desa dapat disampaikan dan dimusyawarahkan bersama. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua UPK Kec. Tilango, bahwa:

Proses sosialisasi dan musyawarah dilaksanakan di tingkat desa yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari masyarakat yang ada di setiap desa. Dalam kegiatan ini diharapkan gagasan dari masyarakat dapat digali sehingga program yang akan dilaksanakan dan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat (IN, 27-08-2012).

Senada dengan itu, informasi yang disampaikan oleh salah seorang wakil masyarakat dan sekaligus ketua PKBM di Desa Lauwonu Kec. Tilango, bahwa:

Musyawarah sangat tepat sekali dilakukan pada saat sosialisasi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui musyawarah warga masyarakat dapat memberikan masukan kepada masyarakat, terutama informasi yang terkait dengan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Biasanya dari musyawarah ini dapat digali gagasan dari masyarakat dan dibuat prioritas program yang akan dilaksanakan. Semua ini berdasarkan kesepakatan dari seluruh anggota masyarakat di desa seperti di Desa Lauwonu ini (RK, 31-07-2012).

Dari penjelasan kedua informan di atas, dan sesuai dengan hasil pengamatan peneliti tahapan sosialisasi dan musyawarah ditingkat kecamatan dan desa memang telah dilaksanakan dengan baik. Tahapan ini merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, dimana

masyarakat mendapatkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Musyawarah merupakan sarana komunikasi yang efektif untuk menggali gagasan dari masyarakat dan sekaligus menyampaikan kebijakan yang dilaksanakan. Hal ini relevan dengan teori yang disampaikan oleh Edwards III tentang pentingnya komunikasi dalam sebuah proses komunikasi. Komunikasi dalam kebijakan ini berlangsung antara pelaku PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa dengan seluruh masyarakat sebagai sasaran dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan guna mengurangi jumlah rumah tangga miskin.

Relevan dengan itu, penyampaian dari Konsultan di tingkat Kabupaten Gorontalo yang menjelaskan tentang pentingnya dilakukan musyawarah dan sosialisasi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Setiap program kalau tidak dijelaskan kepada masyarakat melalui forum musyawarah maupun sosialisasi pasti tidak akan berhasil. Oleh karena itu dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan telah ditetapkan tahapan yang pertama kali dilakukan adalah sosialisasi dan musyawarah yang biasanya dikenal dengan MAD Sos atau Musdes sos. Tujuan kegiatan ini adalah menyampaikan prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan dan sekaligus menggali gagasan dari masyarakat terutama menyangkut kegiatan yang dibutuhkan dan akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan dimasing-masing kecamatan dan desa (HM, 31-07-2012).

Paparan di atas menunjukkan bahwa tahapan sosialisasi dan musyawarah baik di tingkat kecamatan dan desa merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Dengan pemahaman yang sama dari seluruh masyarakat terutama tentang kegiatan yang dilaksanakan dan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan, maka diharapkan masyarakat mempunyai komitmen untuk menjalankan setiap kegiatan yang telah disepakati melalui

musyawarah ditingkat kecamatan dan desa. Hal ini tentunya dapat dilihat pada tahapan akhir setiap kegiatan, dimana tingkat ketercapaian program dapat diukur dan dapat menentukan keberlanjutan pemberian dana PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun berikutnya untuk setiap desa di Kec. Tilango.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sosialisasi dan musyawarah di tingkat desa dapat dijaring gagasan dan usulan kegiatan yang dianggap tepat untuk dilaksanakan melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan. Dalam hal ini diharapkan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

c. Musyawarah Khusus Perempuan

Tahapan musyawarah dilaksanakan khusus untuk program perempuan, dimana dilakukan penggalian gagasan yang berasal dari kelompok perempuan. Dalam kegiatan ini diadakan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan kelompok perempuan untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di Kec. Tilango adalah Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) yang bertujuan memberikan bantuan dana berupa modal usaha bagi usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok perempuan.

Dari hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa tahapan musyawarah khusus perempuan telah dilakukan sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Perdesaan, seperti pengelolaan usaha simpan pinjam yang khusus dikelola oleh kelompok perempuan. Dalam hal ini, tahapan musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk

menggali gagasan dari kelompok perempuan yang meliputi kegiatan pembangunan sarana, pengembangan usaha ekonomi produktif dikelompok perempuan itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Sekretaris kecamatan Tilango yang menegaskan bahwa.

Musyawarah Khusus Perempuan dilaksanakan di tingkat desa dengan tujuan untuk lebih menggerakkan kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Secara umum tujuan musyawarah mempertegas peran perempuan dalam kegiatan pembangunan prasarana, kegiatan usaha ekonomi produktif (untuk wilayah-wilayah tertentu), kegiatan bidang kesehatan, kegiatan bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan. (KI,05-09-2012)

Senada dengan itu ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Ilotidea Kec.Tilango menegaskan bahwa:

Dalam musyawarah khusus perempuan yang dilaksanakan di tingkat desa itu dihasilkan usulan yang di khususkan untuk kegiatan perempuan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah menentukan usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok simpan pinjam perempuan yang masih berjalan aktif dan berusia minimal 1 tahun. Kemudian kegiatan itu pula bertujuan untuk memilih wakil perempuan untuk hadir dalam Musywaran untuk menentukan prioritas usulan dan penulisan usulan (AT, 31-07-2012).

Dari penjelasan beberapa informan maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Khusus Perempuan ini telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang ada pada PTO PNPM Mandiri Perdesaan, dimana dalam PTO dijelaskan bahwa kegiatan musyawarah khusus perempuan lebih dikhususkan pada kelompok perempuan, yaitu mulai dari tahap musyawarah, peserta yang hadir, kesepakatan yang diputuskan itu semuanya di khususkan bagi kelompok perempuan. Melalui tahapan musyawarah ini

diharapkan aspirasi dari kelompok perempuan dapat dilaksanakan melalui kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

d. Perencanaan dan penetapan prioritas usulan

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sebuah kegiatan. Perencanaan yang baik biasanya akan diikuti dengan pencapaian tujuan yang maksimal. Tahapan perencanaan dan penetapan prioritas usulan adalah lanjutan dari musyawarah ditingkat kecamatan dan desa maupun musyawarah khusus perempuan. Pada tahap ini dilakukan proses perencanaan kegiatan berdasarkan gagasan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musyawarah yang telah diadakan pada tahap sebelumnya.

Pada tahapan perencanaan ini juga ditetapkan prioritas usulan kegiatan, memilih dan menetapkan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), menyusun dan menetapkan urutan atau peringkat usulan kegiatan dari tiap desa sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati, menetapkan jadwal usulan serta waktu penyelesaian desain dan RAB, pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kegiatan, dan mendapatkan umpan balik dari forum mengenai kualitas pendamping dan fasilitator kabupaten/kecamatan serta pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitator/konsultan Kabupaten yang menjelaskan bahwa:

Perencanaan dalam Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan tahapan penting dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat melalui musyawarah ditingkat desa dan kecamatan maupun musyawarah khusus perempuan merupakan titik tolak dari

diadakannya perencanaan dan penetapan prioritas usulan kegiatan. Dari perencanaan ini dapat diketahui jadwal dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dari masing-masing desa (HM, 31-07-2012).

Relevan dengan itu, informasi yang disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan yang menjelaskan bahwa:

Dari musyawarah ditingkat desa dan musyawarah khusus perempuan biasanya dilanjutkan dengan perencanaan dan penetapan prioritas usulan kegiatan ditingkat kecamatan. Dalam perencanaan dibuat jadwal, RAB dan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan setiap desa. Hal ini tentunya harus mendapatkan persetujuan dari seluruh perwakilan masyarakat dari setiap desa dan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya (TR, 27-08-2012).

Dari penjelasan kedua informan di atas, dan sesuai dengan hasil pengamatan peneliti ternyata tahapan perencanaan telah dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango. Hal ini relevan dengan penjelasan Sekretaris Kec. Tilango yang menjelaskan bahwa:

Perencanaan di tingkat kecamatan biasanya dilakukan pada bulan Februari-Maret untuk membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Disamping perencanaan usulan kegiatan diadakan juga pemilihan pengurus UPK untuk setiap desa, ditetapkan jadwal prioritas usulan dan waktu penyelesaian serta RAB untuk masing-masing kegiatan yang akan didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan (KI, 05-09-2012).

Senada dengan itu, penjelasan yang disampaikan oleh salah seorang warga masyarakat yang juga merupakan ketua PKBM di Desa Lauwonu Kec. Tilango, bahwa:

Setiap awal tahun biasanya kami diundang untuk mengikuti musyawarah ditingkat kecamatan. Dalam kegiatan ini disusun rencana dan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan usulan dari masing-masing desa. Seperti di Lauwonu ada beberapa kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan misalnya Simpan Pinjam Khusus Perempuan, Pembangunan gedung

PKBM dan kegiatan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dimasing-masing desa (RK, 31-07-2012).

Paparan di atas menunjukkan bahwa tahapan perencanaan telah dilaksanakan dengan baik ditingkat desa dan kecamatan. Gagasan dari masyarakat disampaikan dari tingkat desa melalui musyawarah desa dan dibahas bersama menjadi sebuah rencana yang dapat diusulkan untuk didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Jenis kegiatan yang telah dilaksanakan di Kec. Tilango sejak tahun 2007 sampai 2012 antara lain Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP), Sarana dan prasarana baik pendidikan maupun non pendidikan, serta kegiatan non prasarana lainnya.

Data jumlah dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango yang diperoleh melalui UPK Kec. Tilango mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah data tentang dana yang dipergunakan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango selama 4 tahun terakhir.

Tabel 1 : Penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kec.Tilango Kab. Gorontalo

No.	Tahun	Alokasi Dana	Kegiatan yang didanai
1.	2009	Rp. 2.000.000.000,-	SPKP, Sarana dan Prasarana
2.	2010	Rp. 3.000.000.000,-	SPKP, Prasarana umum, Pendidikan dan Non Prasarana
3.	2011	Rp. 1.967.700.000,-	SPKP, Prasarana umum dan Pendidikan Non Prasarana
4.	2012	Rp. 3.000.000.000,-	SPKP, Prasarana Pendidikan dan Non prasarana

Sumber: UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kec. Tilango Kab. Gorontalo tahun 2012

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada setiap tahun jumlah dana yang diterima dan dipergunakan pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango mengalami fluktuasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu hal yang menyebabkan jumlah dana yang diterima setiap tahun itu mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan oleh tingkat keberhasilan yang dicapai oleh kecamatan secara keseluruhan. Apabila kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai prioritas untuk diusulkan dan didanai tidak terlaksana dengan baik, maka pada tahun berikutnya akan mempengaruhi jumlah dana yang akan diterima oleh kecamatan tersebut.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perencanaan dan penentuan skala prioritas usulan kegiatan yang tepat dapat menunjang keberhasilan dan pencapaian tujuan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Oleh karena itu, tahapan ini harus dilakukan secara cermat mulai dari tingkat desa sampai di tingkat kecamatan, sehingga setiap kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan membawa dampak perbaikan tingkat hidup pada masyarakat penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan.

- e. Musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban serta serah terima realisasi kegiatan

Setelah kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan dilaksanakan, maka tahapan berikutnya adalah musyawarah untuk penyampaian hasil dan pertanggungjawaban kegiatan. Tahapan ini merupakan evaluasi terhadap implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, dimana masing-masing kegiatan

dilaporkan hasilnya melalui musyawarah ini. Dalam hal ini Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator/Konsultan tingkat kabupaten mengadakan pemantauan akhir terhadap realisasi kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan.

Musyawarah ini juga merupakan sarana bagi para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan untuk menyampaikan hasil dan pertanggungjawaban terhadap realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Musyawarah ini biasanya berlangsung pada akhir tahun yang dihadiri oleh seluruh perwakilan desa yang menerima bantuan maupun yang tidak menerima bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini senada dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua UPK Kec. Tilango yang menjelaskan bahwa:

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka biasanya diadakan musyawarah antar desa. Dalam musyawarah ini dihadiri oleh perwakilan dari desa-desa penerima bantuan maupun desa yang belum menerima bantuan. Dalam hal ini disampaikan hasil-hasil yang telah dicapai, pertanggungjawaban dan serah terima realisasi kegiatan kepada pemerintah kecamatan dan desa. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya seperti Pemerintah desa dan kecamatan, UPK, TPK dan pelaku lainnya (AT, 31-07-2012).

Relevan dengan itu, penjelasan dari Fasilitator Kecamatan di Tilango yang menegaskan bahwa:

Tahapan akhir dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban pengelola PNPM Mandiri Perdesaan. Disamping itu pula diadakan serah terima realisasi kegiatan kepada masyarakat. Artinya apa yang telah diprogramkan berdasarkan usulan dari masyarakat dapat diterima hasilnya. Apabila tahapan akhir pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan telah dilakukan, maka masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan tersebut (TR, 27-08-2012).

Dari penjelasan informan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa proses musyawarah pada akhir kegiatan harus dilakukan oleh para pelaku PNPM Mandiri

Perdesaan. Dari hasil pengamatan peneliti, ternyata bahwa musyawarah tentang penyampaian hasil akhir kegiatan ini juga telah dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan, memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang berjalan dengan baik dan sekaligus menyerahkan hasil pekerjaan kepada masyarakat.

Dengan demikian, tahapan musyawarah penyampaian hasil ini merupakan sarana untuk mengukur kinerja para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan setelah menyelesaikan pekerjaannya selama satu tahun. Hal ini relevan dengan teori yang disampaikan oleh Grindle (1980) yang menegaskan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Tingkat pencapaian sasaran merupakan indikator keberhasilan dari sebuah kebijakan. Seperti halnya kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, diadakan evaluasi pada akhir kegiatan yaitu melalui musyawarah antar desa penyampaian hasil dan pertanggungjawaban realisasi kegiatan. Diakhir tahap implementasi kebijakan diadakan penyerahan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Dengan demikian, seluruh tahapan proses implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan telah selesai dilaksanakan, sehingga diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui optimalisasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

Deskripsi tentang tahapan yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan menggambarkan tentang prosedur pelaksanaan kegiatan sejak musyawarah/sosialisai awal sampai dengan musyawarah penyampaian hasil dan penyerahan realisasi hasil kegiatan kepada masyarakat. Dalam proses implementasi kebijakan ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo, antara lain:

a. Faktor internal

(1). Sumberdaya pelaksana dan sasaran kebijakan

Sumberdaya pelaksana terdiri dari para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan meliputi Fasilitator/Konsultan Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknis, UPK, TPK, aparat pemerintah kecamatan dan desa serta seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Sedangkan sasaran kebijakan adalah seluruh masyarakat miskin yang menerima bantuan di Kec. Tilango.

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya pelaksana baik ditingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Sumberdaya pelaksana yang diperlukan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola berbagai kegiatan yang telah ditetapkan pada musyawarah perencanaan baik ditingkat desa maupun kecamatan.

Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitator/Konsultan Kabupaten yang menjelaskan bahwa:

Penyediaan sumberdaya pelaksana kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan ditingkat provinsi dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pada awal pelaksanaan kebijakan ini diadakan perekrutan petugas pelaksana PNPM yang ditempatkan ditingkat kabupaten dan kecamatan yang terdiri dari fasilitator/konsultan tingkat kabupaten, fasilitator kecamatan dan fasilitator teknis kecamatan. Para petugas inilah yang menjadi penggerak, pemantau dan pendamping setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, dipilih para petugas pelaksana yang memenuhi syarat baik dari segi pendidikan dan ketrampilan maupun kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya (HM, 31-07-2012).

Senada dengan itu, penjelasan fasilitator teknis Kec. Tilango yang menegaskan keberadaannya sebagai salah seorang petugas dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

Ditingkat kecamatan ditempatkan fasilitator kecamatan dan fasilitator teknis kecamatan sebagai penggerak, pelaksana, pendamping dan pengawas setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Kami biasanya melaksanakan tugas baik teknis maupun administratif. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan benar-benar mencapai sasaran (ML, 31-07-2012).

Penjelasan kedua informasi di atas menunjukkan bahwa sumberdaya pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan. Dari hasil pengamatan peneliti, sumberdaya pelaksana kebijaksanaan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari beberapa usulan kegiatan yang diajukan untuk dilaksanakan di Kec. Tilango terlaksana dengan baik, sehingga mendorong penambahan dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya pelaksana mampu melaksanakan tugasnya sehingga tidak terjadi

masalah yang dapat menghambat pencapaian sasaran kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Relevan dengan itu, penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Kec, Tilango yang menegaskan bahwa:

Dalam melaksanakan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, para pelaksana baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa telah memainkan perannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan setiap usulan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Para petugas yang direkrut juga benar-benar berkualitas sehingga kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan ini dapat berhasil. Tentunya ini berdampak pada pencairan dan bahkan penambahan dana untuk Kec. Tilango pada tahun berikutnya (KI, 05-09-2012).

Paparan di atas menegaskan pentingnya keberadaan sumberdaya pelaksana dalam sebuah kebijakan. Hal ini relevan dengan teori yang disampaikan oleh Edwards III (1980) bahwa sumberdaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Keberadaan sumberdaya pelaksana yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan sebuah kebijakan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, mulai dari perekrutan sampai pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dari sumberdaya pelaksana kebijakah harus diperhatikan dengan baik, sehingga tugas yang diembannya mendorong pencapaian sasaran kebijakan.

Peran sumberdaya pelaksana menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Disamping itu, harus diperhatikan juga sasaran kebijakan yaitu masyarakat miskin sebagai penerima bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Peran masyarakat sebagai

sasaran kebijakan harus diperhatikan, sehingga setiap usulan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan akan berhasil karena mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat di Kec. Tilango. Partisipasi dan peran aktif dari warga masyarakat sangat menentukan keberhasilan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sumberdaya pelaksana dan sasaran kebijakan dalam kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam hal ini sangat diperlukan sumberdaya pelaksana yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjang pula dengan tingkat partisipasi dari warga masyarakat sebagai sasaran penerima bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan. Kedua hal ini tidak dapat diabaikan karena sangat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan dari PNPM Mandiri Perdesaan yaitu pengentasan kemiskinan.

(2). Komunikasi antara pelaksana kebijakan

Dalam sebuah kebijakan faktor komunikasi menjadi salah satu penentu keberhasilan. Komunikasi yang efektif antara aparat pelaksana kebijakan menjadi titik awal keberhasilan sebuah kebijakan. Komunikasi dapat terjadi pada saat penyampaian kebijakan sampai kebijakan itu diimplementasikan. Oleh karena itu, perlu diciptakan komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan.

Peran faktor komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III (1980) yang menegaskan pentingnya komunikasi. Komunikasi dimulai pada saat sosialisasi dan

musyawarah ditingkat kecamatan maupun desa sampai pada saat penyampaian dan penyerahan hasil realisasi kegiatan kepada masyarakat. Hal ini senada dengan penyampaian Fasilitator/Konsultan Kabupaten yang menegaskan bahwa:

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan memang sangat diperlukan komunikasi yang baik antara aparat pelaksana. Berbagai informasi maupun petunjuk teknis dalam melaksanakan kegiatan dapat diketahui oleh aparat pelaksana maupun masyarakat penerima bantuan melalui proses komunikasi yang baik. Oleh karena itu harus dibangun komunikasi antar aparat sehingga diharapkan akan ada kesatuan langkah dan gerak melaksanakan setiap kegiatan yang di danai dari PNPM Mandiri Perdesaan (HM, 31-07-2012).

Sejalan dengan itu pula, informasi yang disampaikan oleh Fasilitator Kecamatan bahwa:

Kami biasanya mendapatkan informasi dan arahan dari Konsultan Kabupaten. Setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus ada koordinasi dengan aparat ditingkat kabupaten dan desa. Dalam hal ini, kami membangun komunikasi dengan aparat pelaksana ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Melalui komunikasi yang baik diperoleh informasi dan solusi yang terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (TR, 27-08-2012).

Penjelasan kedua informan di atas menegaskan bahwa faktor komunikasi sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah program. Relevan dengan itu, informasi yang disampaikan oleh Ketua UPK Kec. Tilango, bahwa:

Untuk menyampaikan semua informasi kepada masyarakat, tentunya para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus memahami prosedur pelaksanaan program. Dalam melaksanakan kegiatan selalu didasarkan atas PTO yang ada. Berbagai aturan dalam PTO menjadi dasar untuk mengadakan komunikasi antara aparat pelaksana maupun antara aparat dengan masyarakat sebagai sasaran PNPM Mandiri. Oleh sebab itu, sebaiknya dilakukan komunikasi yang efektif sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditentukan (IN, 27-08-2012).

Penjelasan beberapa informan di atas, menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan sangat diperlukan komunikasi yang baik antara aparat pelaksana kebijakan. Komunikasi yang baik menjadi satu hal yang penting, sejalan dengan teori yang disampaikan Edwards III (1980) yang menegaskan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi. Komunikasi dapat berlangsung apabila seluruh pelaku PNPM mengetahui aturan dan prosedur pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar aparat pelaksana mengetahui hal yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Realitas empirik yang peneliti amati juga menunjukkan bahwa setiap aparat pelaksana kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango, berusaha untuk membangun komunikasi antara aparat pelaksana maupun antara aparat pelaksana dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Berbagai informasi disampaikan melalui forum musyawarah baik dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat, pelaksanaan kegiatan yang optimal dan mencapai sasaran serta pelaporan/pertanggungjawaban aparat pelaksana kebijakan kepada masyarakat.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi antara aparat pelaksana merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango. Dengan komunikasi yang efektif antara aparat pelaksana dan sasaran kebijakan maka prosedur dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dapat dipahami. Hal ini mendorong pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan masyarakat.

(3). Adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan

Disposisi atau komitmen merupakan tekad dari aparat pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan PTO yang ada. Dalam kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan komitmen ini merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan kebijakan. Hal ini relevan dengan teori yang disampaikan oleh Edwards III (1980) dan Mazmanian Sabatier (1983) yang menegaskan perlunya komitmen dari aparat pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakan.

Disposisi atau komitmen diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh aparat pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi atau sikap yang baik dalam menjalankan tugas, maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika aparat pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak akan berjalan dengan baik.

Dari hasil pengamatan peneliti, komitmen dari aparat pelaksana kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan sangat besar sekali. Hal ini ditunjukkan dengan ketekunan, kejujuran dan kemauan yang keras dari aparat pelaksana kebijakan dalam menjalankan setiap kegiatan yang telah direncanakan. Bahkan di Kec. Tilango pengurus UPK menetapkan Standar Operasional Prosedur yang menetapkan petunjuk teknis (prosedur kerja) maupun sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus UPK dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya.

Dalam SOP UPK Kec. Tilango disebutkan beberapa sanksi terhadap pelanggaran prosedur dan standar pengukuran kinerja aparat pelaksana. Pelanggaran terhadap kode etik seperti tidak masuk kerja berturut-turut dalam 3 (tiga) hari tanpa seizin Fasilitator Kecamatan, atau pengurus UPK tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya dapat dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja pengurus yang dapat dikategorikan sebagai kinerja rendah bagi pengurus UPK yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong komitmen aparat pelaksana untuk menjalankan setiap kegiatan dengan baik dan benar.

Paparan di atas, sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango yang menegaskan bahwa:

Pengurus UPK harus benar-benar menjalankan tupoksinya dengan baik. Jika ada pengurus yang tidak menjalankan tugasnya, mengabaikan aturan yang ada maka akan mempengaruhi penilaian kinerja pengurus UPK secara keseluruhan. Pengurus ini harus diberikan sanksi sesuai dengan kategori

pelanggaran dan penilaian kerjanya disesuaikan dengan SOP UPK dan ketentuan yang berlaku dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mencapai kinerja yang baik maka sangat diperlukan komitmen dari seluruh pengurus dan para pelaku PNPM Mandiri sehingga tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Pencapaian tujuan dan keberhasilan di setiap kecamatan tentunya akan berpengaruh terhadap dana PNPM Mandiri Perdesaan yang akan diterima pada tahun berikutnya (TR, 27-08-2012).

Relevan dengan itu, informasi yang disampaikan oleh Fasilitator/Konsultan tingkat Kabupaten yang menjelaskan bahwa:

Untuk setiap kecamatan diadakan penilaian kinerja. Dimana masing-masing UPK melakukan tufoksinya. Dalam hal ini komitmen aparat pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Oleh karena itu, kerjasama, kesungguhan dan komitmen dari seluruh pengurus untuk melaksanakan setiap kegiatan dengan baik sangat diperlukan. Dengan kerjasama dan komitmen yang baik maka dapat dipastikan kegiatan yang dilaksanakan di setiap kecamatan akan berhasil (HM, 31-07-2012).

Dari penjelasan kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa komitmen antara aparat pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan baik sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Oleh karena itu, komitmen pengurus harus ditumbuhkan sehingga pengurus mempunyai kemauan, kejujuran dan sifat-sifat yang dapat mendorong kelancaran setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, komitmen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Faktor eksternal

(1) Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di

Kec. Tilango. Dari hasil pengamatan peneliti, masyarakat yang menjadi sasaran dan penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan sangat merasakan bantuan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Kec. Tilango. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebelum menerima bantuan sangat berbeda dengan kondisi mereka setelah menerima bantuan tersebut.

Sebagian kepala keluarga miskin penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya tidak memiliki ketrampilan dan pekerjaan tetap sehingga pendapatannyapun sangat kecil. Kemampuan dan daya beli masyarakat sangat rendah sehingga kebanyakan masyarakat miskin tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kondisi sosial, ekonomi masyarakat dan kemajuan teknologi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Subarsono (2008) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor tersebut biasanya dikenal dengan variabel lingkungan sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, disamping karakteristik masalah dan karakteristik kebijakan/undang-undang.

Hal ini juga sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh salah seorang Ketua PKBM di Desa Lauwonu Kec. Tilango, bahwa:

Masyarakat desa biasanya punya keterbatasan kemampuan dan tingkat pendapatannyapun sangat rendah. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada awalnya sangat memprihatinkan. Namun berkat bantuan yang diterima dari PNPM Mandiri Perdesaan masyarakat mulai meningkat pendapatannya. Beberapa orang dari warga masyarakat yang tidak memiliki ketrampilan mulai diberikan pembinaan dan pelatihan sesuai dengan bidang/ketrampilan yang dimilikinya. Dan sekarang malah sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki usaha sendiri seperti pembuatan kue, bengkel, pembuatan bentor (las), menjahit, krawang dan lain-lain. Kondisinya

sekarang sudah lebih baik dan masyarakat sudah punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (RK, 31-07-2012).

Penjelasan di atas sangat relevan dengan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Tilango yang menegaskan bahwa:

Keberadaan PNPM Mandiri di Kec. Tilango sangat membantu masyarakat miskin. Kondisi masyarakat yang tadinya sangat memprihatinkan, namun dengan pemberian bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat mendorong kemandirian masyarakat. Bahkan masyarakat yang tadinya tingkat hidup dan kondisi ekonominya sangat rendah, berubah dan semakin meningkat. Masyarakat di Kec. Tilango ini biasanya hanya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, karena tempat hidupnya dekat dengan pesisir Danau Limboto. Tapi sekarang sudah banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan bantuan dari pemerintah dan kondisi sosial maupun ekonominya semakin membaik (KI, 5-9-2012).

Penjelasan senada pula disampaikan oleh Ketua TPK di desa Ilotidea yang menegaskan bahwa:

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat mengalami perbaikan sejak adanya bantuan dari PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango. Sebagian besar masyarakat di Ilotidea hanya hidup sebagai nelayan dipinggiran Danau Limboto. Berkat pembinaan dan ketrampilan yang diberikan oleh petugas PNPM Mandiri maka masyarakat menjadi lebih mandiri. Ada beberapa kegiatan usaha yang mulai dijalankan oleh masyarakat seperti bengkel, menjahit, meubel dan pembuatan kue. Dengan cara seperti ini biasanya masyarakat memperoleh pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. (AT, 31-07-2012).

Dari penjelasan informan di atas, dapat ditegaskan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat semakin meningkat dengan dilaksanakannya kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango. Masyarakat diberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatannya. Tindakan ini merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Kec. Tilango.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat harus diperhatikan, karena merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Upaya perbaikan kondisi sosial dan ekonomi dapat dilakukan melalui pembinaan dan pemberian ketrampilan yang dapat digunakan untuk mengelola bantuan dana yang disalurkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan. Dengan kondisi sosial dan ekonomi yang baik dari warga masyarakat maka semua kegiatan yang telah direncanakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

(2) Budaya masyarakat

Budaya masyarakat adalah suatu kebiasaan atau tradisi yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, dimana budaya ini biasanya berpengaruh terhadap pola hidup dan interaksi antara masyarakat di suatu tempat. Budaya adalah pikiran dan akal budi. Orang atau masyarakat berbudaya artinya masyarakat yang mempunyai pikiran atau akal budi untuk memajukan diri dan bangsanya (Badudu, 1994). Budaya juga sering diidentikan dengan sikap, kebiasaan, tingkah laku yang dilakukan bersama-sama dan dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Bentuk budaya yang ada dalam masyarakat di Gorontalo seperti budaya *huyula* (gotong royong), *dulohupa* (musyawarah), *motiayo* (sukarela), budaya *landingalo* (malas) dan *mohihiya* (iri hati dan tidak senang melihat keberhasilan

orang lain). Sebagian dari budaya masyarakat ini masih berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat di Gorontalo.

Dari hasil pengamatan peneliti, sebagian budaya masyarakat yang ada ternyata cukup mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitator/ Konsultan PNPM Mandiri Perdesaan tingkat Kabupaten yang menjelaskan bahwa:

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan masyarakat menunjukkan budaya yang cukup baik. Pada awal kegiatan dimulai dengan musyawarah (*dulohupa*) ditingkat kecamatan sampai di tingkat desa. Dalam kegiatan ini diberikan informasi dan jaringan gagasan dari masyarakat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Selama proses pelaksanaan kegiatan diterapkan budaya gotong royong (*huyula*) dimana seluruh warga masyarakat secara sadar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Dan di akhir kegiatan diadakan musyawarah (*dulohupa*) lagi yang merupakan forum untuk menyampaikan hasil dan pertanggungjawaban sekaligus penyerahan hasil kegiatan/program yang telah dilaksanakan (HM, 31-07-2012).

Informasi ini senada dengan penjelasan Sekretaris Kecamatan Tilango yang menjelaskan bahwa:

Dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan memang sangat kelihatan kerjasama masyarakat. Sebagian besar masyarakat memperlihatkan budaya *huyula*, dimana masyarakat bergotong royong untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Tentunya, hal ini harus didasari dengan kesadaran warga masyarakat dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan untuk melaksanakan kegiatan dengan baik. Forum musyawarah (*dulohupa*) dihidupkan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi dan menghimpun gagasan dari masyarakat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (KI, 5-9-2012).

Dari penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa bentuk budaya yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan pernyataan sikap

dan pola hidup yang ada di masyarakat Gorontalo. Budaya yang ditunjukkan oleh masyarakat pada dasarnya sangat membantu keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap tahapan implementasi kebijakan ini dilakukan dengan menerapkan budaya yang berkembang pada masyarakat seperti budaya *dulohupa*, *huyula* dan *motiayo*.

Realitas empirik yang peneliti temukan juga menunjukkan bahwa beberapa forum musyawarah (*dulohupa*) yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah merupakan bentuk nyata dari budaya masyarakat yang sangat berperan dalam mencapai keberhasilan kebijakan ini di Kec. Tilango. Walaupun disisi lain masih ditemukan juga bentuk budaya yang kurang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, seperti budaya *landingalo* (malas), *mohihiya* (iri hati dan tidak senang melihat keberhasilan orang lain). Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh salah seorang Ketua PKBM di Desa Tualango yang menegaskan bahwa:

Budaya masyarakat Gorontalo tentunya ada yang dapat membantu kelancaran kegiatan PNPM Mandiri, dan ada juga yang dapat menghalangi kemajuan masyarakat. Seperti budaya *dulohupa* dan *huyula* tentu sangat baik apabila diterapkan sejak awal sampai akhir kegiatan. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang masih menerapkan budaya *landingalo* dan bahkan *mohihiya*. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan apapun yang telah direncanakan, pasti tidak akan berhasil kalau masyarakat masih menganut budaya yang kurang bagus ini. (ZH, 30-07-2012).

Dari hasil pengamatan peneliti, masyarakat yang masih menerapkan budaya *landingalo* dan *mohihiya* cenderung mengalami kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Dari beberapa kelompok yang diberikan bantuan dana PNPM Mandiri

Perdesaan tidak dapat mengembangkan usaha yang dimilikinya terkait dengan budaya ini. Sifat malas dan perasaan iri hati melihat kegiatan orang lain menjadi kendala besar bagi masyarakat. Dari beberapa warga masyarakat yang memperoleh bantuan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan biasanya dinilai kurang layak oleh warga lainnya yang tidak mendapatkan bantuan yang sama. Hal ini tentunya akan membawa dampak bagi pengembangan usaha masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut. Oleh karena itu, sedapat mungkin budaya *landingalo* dan *mohihiya* ini dihilangkan dari kehidupan masyarakat, sehingga kegiatan yang telah direncanakan dan didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango akan mengalami keberhasilan dan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan/kesejahteraan hidupnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya masyarakat yang ada di Kec. Tilango pada dasarnya turut berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa bentuk budaya dapat menjadi faktor pendukung apabila dapat dimaksimalkan dalam proses implementasi kebijakan dan budaya dapat juga menjadi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan apabila tidak dapat dikendalikan sehingga mengganggu proses implementasi. Oleh karena itu, sedapat mungkin diusahakan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dikondisikan dengan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentu akan semakin mendorong pencapaian tujuan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan masyarakat di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

(3) Pengaruh politik lokal.

Dinamika politik adalah suasana politik, keadaan percaturan politik seperti menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah/desa (Badudu, 1994). Dinamika politik lokal ini biasanya mempengaruhi kehidupan masyarakat disuatu daerah atau desa, dimana masyarakat berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya. Adanya dukungan/partisipasi dari masyarakat dalam penyampaian aspirasi politiknya ini akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan.

Realitas empirik yang peneliti temukan, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah dan perencanaan kegiatan sebagai tahapan awal implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pencerminan dari dinamika politik lokal yang cukup baik. Penciptaan kondisi ini membawa dampak pada terlaksananya setiap kegiatan yang telah direncanakan. Realitas ini sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Camat Tilango yang menegaskan bahwa:

Pada proses musyawarah dan perencanaan tahap awal dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mendapatkan dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan pola kepemimpinan kepala daerah/desa dan aparatnya yang dapat berpengaruh terhadap terlaksananya program/kebijakan yang telah direncanakan. Masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap seseorang yang disegani atau dihormati dalam kehidupan masyarakat setempat, dimana hal ini akan berdampak pada keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah atau desa tersebut (ABH, 7-9-2012).

Senada dengan itu, informasi yang disampaikan oleh Ketua UPK Kec.

Tilango bahwa:

Dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tingkat partisipasi dari masyarakat sangat menentukan. Biasanya pada saat sosialisasi dan musyawarah ditingkat kecamatan dan desa masyarakat yang diundang pasti akan hadir. Kehadiran mereka ini sangat terkait dengan komitmen mereka untuk membantu memajukan desanya masing-masing. Peran kepala desa nampak dalam bentuk dorongan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, ada beberapa desa yang baru memilih kepala desa, dan masyarakatnya yang diundang untuk mengikuti musyawarah ditingkat desa/kecamatan tidak hadir. Situasi seperti ini biasanya berpengaruh terhadap penyampaian aspirasi/gagasan yang tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat di desa tersebut (IN, 27-08-2012).

Dari hasil pengamatan peneliti juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat merupakan cerminan kondisi politik masyarakat yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dinamika politik masyarakat yang ada di Kec. Tilango pada dasarnya merupakan modal besar dalam melaksanakan setiap kebijakan. Demikian juga dengan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan menentukan pencapaian tujuan kebijakan ini. Dalam hal ini, perlu diciptakan kondisi politik lokal dimasyarakat yang dapat mendukung dan mendorong tingkat partisipasi masyarakat, sehingga setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan maksimal. Pencapaian tujuan dari setiap kegiatan ini akan membawa dampak pada keberlanjutan dan bahkan penambahan/pengurangan terhadap dana PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun berikutnya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dinamika politik lokal masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang baik terhadap setiap tahapan

kebijakan yang dilaksanakan, maka akan diikuti pula dengan pencapaian tujuan kebijakan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat yang merupakan bentuk nyata dari dinamika politik lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

4.3.3 Dampak Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

- a. Pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pencapaian tujuan kebijakan menjadi tolok ukur tingkat keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan. Dalam kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dampaknya dapat dilihat melalui berbagai aspek seperti adanya pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan peningkatan pendapatan masyarakat serta upaya pengentasan kemiskinan.

Pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan, dimana masyarakat merasakan manfaat langsung dari sebuah proses implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua PKBM di Desa Lauwunu yang menjelaskan bahwa:

Pada tahun 2009 telah dibangun gedung PKBM di Desa Lauwunu dan menjadi titik awal pengembangan kegiatan masyarakat. Kami sebagai pengurus tentunya harus dapat memahami kebutuhan masyarakat terutama dalam mengembangkan usaha yang dikelola anggota PKBM. Dana PNPM Mandiri di desa Lauwunu digunakan untuk pembangunan fisik berupa gedung PKBM yang disalurkan dalam 2 tahun yaitu tahun 2009 sebesar 300 juta rupiah dan tahun 2010 sebesar 300 juta rupiah. Kesemua dana ini digunakan untuk membangun dan menyediakan fasilitas yang ada di PKBM. Dengan penyediaan fasilitas dan gedung ini masyarakat yang mempunyai

usaha produktif semakin terbantu dan tingkat pendapatannyapun semakin bertambah (RK, 31-07-2012).

Relevan dengan itu, penjelasan dari Camat Tilango yang menegaskan bahwa:

Pembangunan fisik dapat dilakukan melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan, seperti gedung PKBM di beberapa desa, pembuatan jalan desa, jembatan dan kegiatan lainnya. Tentunya, kegiatan pembangunan fisik ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, sarana dan prasarana yang ada sangat menunjang kelancaran aktivitas dari masyarakat. Beberapa usaha yang dikelola oleh masyarakat semakin dikembangkan melalui upaya penyediaan berbagai fasilitas penunjang. Hal ini dilakukan demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (ABH, 7-9-2012).

Penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Dari hasil pengamatan peneliti ternyata kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembuatan sarana jalan dan jembatan, pembuatan gedung PKBM di empat desa sangat membantu aktivitas masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dikatakan telah membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango dapat dilihat melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Beberapa jalur jalan telah dibuka dan sarana jembatanpun telah dibangun, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan aktivitas dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Disamping itu, pembangunan gedung PKBM di empat desa yaitu Lauwonu, Ilotidea, Tualango

dan Tabumela diharapkan dapat memacu percepatan pertumbuhan usaha produktif masyarakat.

Walaupun dari hasil pengamatan peneliti, pemanfaatan gedung dan fasilitas PKBM yang ada di Kec. Tilango ini belum maksimal namun kehadiran gedung dan fasilitas ini merupakan wujud nyata dari keberhasilan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Di beberapa desa di Kec. Tilango seperti desa Tualango, Ilotidea dan Tabumela belum memanfaatkan gedung dan fasilitas PKBM dengan baik. Gedung PKBM tidak digunakan untuk mengembangkan usaha anggota PKBM di ketiga desa ini. Kegiatan usaha produktif yang seharusnya dilaksanakan melalui PKBM, belum berhasil sebagaimana yang ada di PKBM di Desa Lauwonu. Gedung PKBM di Lauwonu menjadi pusat kegiatan usaha produktif anggotanya, sehingga tingkat pendapatan masyarakat meningkat. Kehadiran gedung PKBM sangat dirasakan manfaatnya dalam rangka mengaktifkan kegiatan anggota PKBM. Beberapa jenis usaha yang berkembang melalui PKBM di Kec. Tilango dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2 : Jenis Kegiatan PKBM di Kec. Tilango Kab. Gorontalo

No.	Nama Desa	Jenis Kegiatan	Ket
1.	Ilotidea	Meubel, Kue, Catring, Bengkel, Menjahit	Kurang aktif
2.	Lauwonu	Bengkel Las (Pembuatan bentor), Menjahit, Krawang, Kejar Paket A, B, Pembuatan Kue, Catring, Meubel Kayu, Bengkel, Post Paud, Posyandu, Tata Rias dan Taman bacaan.	Aktif
3.	Tabumela	Pembuatan kue, Menjahit, dan Meubel kayu	Kurang aktif
4.	Tualango	Menjahit, Bengkel dan Pembuatan kue	Kurang aktif

Sumber: Pengelola PKBM Kec. Tilango Kab. Gorontalo tahun 2012.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kegiatan PKBM sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usaha produktif masyarakat. Dari empat desa yang ada, ternyata hanya PKBM yang ada di Desa Lauwону yang memiliki aktivitas yang tinggi dengan berbagai jenis usaha yang dikembangkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat perkembangan PKBM sangat ditentukan oleh keberadaan pengurus PKBM. PKBM di Desa Lauwону dikelola oleh penggagas awal dan sekaligus penyelenggara setiap kegiatan PKBM di desa tersebut. Seorang mantan kepala sekolah yang pada awalnya hanya ingin membantu masyarakat miskin untuk menggerakkan usahanya dalam sebuah wadah organisasi ternyata telah mampu mengubah *mint set* (pola pikir) masyarakat untuk bergabung dalam PKBM di desa Luawonu.

Keberadaan pengelola PKBM ini telah mendorong masyarakat yang mempunyai usaha produktif untuk melaksanakan kegiatan secara bersama-sama, sehingga pada tahun 2009 PKBM ini mendapatkan bantuan sebuah gedung PKBM dari PNPM Mandiri Perdesaan. Pembangunan gedung ini telah menyerap dana sebesar 600 juta rupiah pada tahun 2009 dan 2010.

Realitas empirik yang terjadi pada PKBM di desa Lauwону dimana kegiatan produktif dari anggotanya berkembang dengan baik, tidak diikuti oleh PKBM di desa lainnya (Ilotidea, Tualango dan Tabumela) di Kec. Tilango. Beberapa masalah yang terjadi dan menghambat kemajuan PKBM di tiga desa ini sangat terkait dengan manajemen PKBM. Disamping itu juga pengurus dan anggota PKBM tidak

serius dalam mengembangkan usahanya, sehingga wadah PKBM belum memberikan kontribusi terhadap perbaikan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan telah membawa perubahan dalam bentuk pembangunan fisik (gedung PKBM) yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan gedung melalui pengembangan usaha produktif yang dimiliki oleh anggota PKBM pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan terutama anggota PKBM khususnya dan masyarakat pada umumnya.

b. Upaya pengentasan kemiskinan

Pada dasarnya upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti PNPM Mandiri Perdesaan. Di Kec. Tilango kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pembangunan sarana/prasarana fisik dan non fisik, penyediaan dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil pengamatan peneliti, kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Tilango dapat dikategorikan sangat berhasil dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kab. Gorontalo. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitator/Konsultan Kabupaten yang menjelaskan bahwa:

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di setiap kecamatan dan desa biasanya berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lokasi tersebut. Ada kegiatan pembangunan fisik dan non fisik, tergantung aspirasi

dan kebutuhan masyarakat. Walaupun berbeda kegiatan, namun tujuannya tetap sama yaitu meningkatkan pendapatan dan menanggulangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. (HM, 31-07-2012).

Senada dengan itu, penjelasan dari Sekretaris Kec. Tilango yang menegaskan bahwa:

Upaya pengentasan kemiskinan memang dilakukan melalui berbagai kegiatan. Sekarang banyak sekali program dan dana yang diberikan oleh pemerintah guna memperbaiki tingkat hidup masyarakat miskin. Salah satunya melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan, dimana masyarakat miskin mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha yang dikelola oleh masyarakat maupun menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di setiap desa tentu berbeda jenis kegiatan yang dilakukan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat pada saat musrembang ditingkat kecamatan (KI, 5-9-2012).

Penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin sebagai sasaran/penerima bantuan. Hal ini relevan dengan informasi yang disampaikan oleh Ketua PKBM di Desa Tualango yang menjelaskan bahwa:

Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya telah membantu sekali bagi masyarakat. Beberapa usaha produktif dibantu melalui dana SPKP sehingga usaha itu dapat berkembang. Namun, tidak semua masyarakat memanfaatkan dana yang diterimanya ini dengan baik. Hal ini berakibat pada penilaian buruk terhadap keberhasilan PNPM Mandiri di desa itu, sehingga tahun berikutnya kita tidak mendapatkan lagi bantuan dari PNPM Mandiri. Padahal pemerintah telah menyediakan sarana dan dana yang cukup besar untuk membantu masyarakat, sehingga bisa keluar dari kemiskinan. (ZH, 30-07-2012).

Hal berbeda disampaikan oleh Ketua PKBM di Desa Lauwonu yang menegaskan bahwa:

Pemberian bantuan PNPM Mandiri Perdesaan sangat tepat sekali. Bagi warga di Lauwону kita manfaatkan dengan baik. Bantuan dana yang paling besar yang diterima adalah pembangunan gedung PKBM dan fasilitasnya. Hal ini merupakan bukti nyata dari keseriusan pemerintah untuk memperbaiki tingkat hidup dan bahkan membantu warga masyarakat miskin agar menjadi mandiri dan mempunyai pendapatan yang tetap dari kegiatan usahanya. Upaya-upaya seperti ini ditujukan untuk mengurangi angka kemiskinan (RK, 31-07-2012).

Paparan di atas menegaskan bahwa pemberian bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan telah membawa perubahan bagi masyarakat penerima bantuan. Dari hasil pengamatan peneliti adanya perubahan yang dirasakan oleh masyarakat dapat diamati melalui peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Fenomena ini sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh Ripley (1985) yang menegaskan keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, dampak kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dilihat dari perubahan yang dicapai oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Salah satu perubahan itu berupa peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan telah membawa dampak berupa perubahan bagi masyarakat baik berupa pembangunan sarana/prasarana, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, diharapkan tidak ditemukan lagi masyarakat miskin yang tidak memiliki pendapatan yang tetap, dimana masyarakat menjadi mandiri dan mampu mengembangkan usahanya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan terdapat lima tahapan implementasi kebijakan yaitu (a). sosialisasi dan musyawarah di tingkat kecamatan, (b). sosialisasi dan musyawarah di tingkat desa untuk penggalan gagasan, (c). musyawarah khusus perempuan, (d). perencanaan dan penetapan prioritas usulan, dan (e) musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban serta serah terima realisasi kegiatan.
2. Dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan terdapat faktor internal dan eksternal yang menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Faktor internal terdiri: (a). Sumberdaya pelaksana dan sasaran kebijakan, (b) Komunikasi antara pelaksana kebijakan, dan (c). Adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan, dan faktor eksternal yaitu: (a) Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, (b) Budaya masyarakat, (c). Pengaruh politik lokal
3. Dampak implementasi kebijakan dapat dilihat pada pembangunan fisik (sarana/prasarana) dan peningkatan pendapatan serta pengentasan kemiskinan masyarakat di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

5.2 Saran

Setelah melalui penelitian mendalam tentang implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mendorong pencapaian tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, maka hendaknya aparat pelaksana/pelaku PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan tetap konsisten dalam menjalankan setiap tahapan implementasi kebijakan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan masyarakat yang ada di Kec. Tilango Kab. Gorontalo bisa tercapai.
2. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan, agar dapat diperhatikan oleh aparat pelaksana dan sasaran kebijakan, sehingga setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mendorong upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.
3. Bagi masyarakat penerima bantuan PNPM Mandiri Perdesaan disarankan untuk dapat memanfaatkan bantuan baik sarana/prasarana maupun penambahan modal (SPKP) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat. Upaya ini tentunya diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kec. Tilango Kab. Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahab, Solichin .1997. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Alex, 2005. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya : Karya Mandiri.
- Anderson, James E, 1984. *Public Policy-Making*. USA : CBS College Publishing
- Badudu, Yusuf, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Provinsi Gorontalo, Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2010.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- . 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Dunn, William. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Terjemahan). Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 1996. *Understanding Of Publik Policy*. New Jersey : Prentice Hall
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washintong DC: Congressional Quarterly Press
- Gogging, Malcolm L. tanpa tahun. *Implementation Theory And Practice Toward A Third Generation*. London England : Glenview, Illinois.
- Grindle, S, Merilee. 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*, New Jersey in The United Kongdom : Princeton University Press
- Hikmat, Harry, 2004 _ Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora, Bandung.
- Hogwood Brian and Gunn Lewis. 1984. *Policy Analysis For The Real World*. New York : Oxford University Press.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada

- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gaya Media
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang ; Model-model, perumusan, implementasi dan evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Pasolong, Harbani, 2008, *Kepemimpinan birokrasi*, Bandung, Alfabeta
- Subarsono, A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik ; Konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfa Beta.
- Thoha, Miftah, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Kencana
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Visi Media.
- Yuliadi, Imamudin, 2007 – *Perekonomian Indonesia masalah dan implementasi kebijakan*, UPFE-UMY, Yogyakarta.

Lampiran1. Pedoman Wawancara

1. Tahapan Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan.

- a. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat kecamatan.
 - Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi di tingkat kecamatan?
 - Bagaimanakah pelaksanaan musyawarah tingkat kecamatan?
- b. Sosialisasi dan musyawarah di tingkat desa untuk penggalan gagasan.
 - Bagaimanakah pelaksanaan sosialisai dan musyawarah di tingkat desa?
 - Bagaimanakah pelaksanaan musyawarah di tingkat desa untuk menggali gagasan?
- c. Musyawarah khusus perempuan
 - Bagaimanakah pelaksanaan musyawarah khusus perempuan?
- d. Perencanaan dan penetapan prioritas usulan
 - Bagaimanakah proses perencanaan terhadap usulan kegiatan?
 - Bagaimanakah penetapan prioritas terhadap usulan kegiatan?
- e. Musyawarah penyampaian hasil dan pertanggungjawaban serta serah terima realisasi kegiatan.
 - Bagaimanakah tahapan musyawarah untuk penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan?
 - Bagaimanakah musyawarah pertanggungjawaban kegiatan dilaksanakan?
 - Kapan diadakan serah terima realisasi kegiatan kepada masyarakat?
 - Bagaimana pelaksanaan serah terima realisasi kegiatan ?

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan

a. Faktor internal

1). Sumberdaya pelaksana dan sasaran kebijakan

- Bagaimanakah kriteria sumberdaya pelaksana kebijakan PNPM Mandiri ?
- Siapakah yang menjadi sasaran dalam kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan?

2). Komunikasi antara pelaksana kebijakan

- Komunikasi yang bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh pelaksana kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan?

3). Adanya komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan

- Apakah diperlukan komitmen bersama dari aparat pelaksana kebijakan?

b. Faktor eksternal

1). Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat

- Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan?
- Apakah kondisi ekonomi masyarakat juga turut berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan?

2). Budaya masyarakat

- Apakah budaya masyarakat turut berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan?
- Budaya yang bagaimanakah yang dapat menunjang keberhasilan Implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan?

3). Pengaruh politik lokal

- Bagaimanakah pengaruh politik lokal terhadap keberhasilan implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan?

3. Dampak implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan

a. Pembangunan fisik (sarana dan prasarana) dan peningkatan pendapatan

- Apakah ada pembangunan fisik yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Perdesaan?
- Apakah kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat?

b. Pengentasan kemiskinan.

Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaan?

Lampiran 2: Daftar nama informan

DAFTAR NAMA INFORMAN

No.	Nama Informan	Jabatan	Ket
1.	Abdul Aziz Hasan	Camat Tilango	ABH
2.	Kisman Idji	Sekcam Tilango	KI
3.	Hasan Mohamad	Konsultan Kabupaten	HM
4.	Taufik Rizky	Fasilitator Kecamatan	TR
5.	Muhajir Lamohamad	Fasilitator Teknis	ML
6.	Hariyanto Budiman	PKBM Tabumela	HB
7.	Ismail Nurudji	Ketua UPK Tilango	IN
8.	Rasuna Kasim	PKBM Lauwonu	RK
9.	Abdullah Tuna	TPK Ilotidea	AT
10.	Warni Tahir	Sekdes Tabumela	WT
11.	Hariyanto	Kades Lauwonu	H
12.	Zakaria Harmain	PKBM Tualango	ZH
13.	Asni N Intiu	PKBM Tualango	AI

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Photo: Saat wawancara dengan Fasilitator/Konsultan Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri di UPK Kec. Tilango tanggal 31-07-2012



Photo : Saat wawancara dengan Fasilitator/Konsultan Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri di UPK Kec. Tilango tanggal 31-07-2012



Photo : Saat pengambilan data di gedung PKBM Kec. Tilango tanggal 30-7-2012



Foto : Saat pengambilan data di gedung PKBM Kec. Tilango tanggal 30-07-2012.

Lampiran 4. Biaya Penelitian

A. Rekapitulasi anggaran biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1.	Gaji dan upah	Rp. 5.080.000,-
2.	Bahan habis pakai dan peralatan	850.000,-
3.	Perjalanan	440.000,-
4.	Lain-lain	10.820.000,-
	Jumlah	Rp. 17.190.000,-

B. Justifikasi biaya penelitian

No	Komponen	Biaya (Rp)
1	Gaji dan Upah	
	a. Honor ketua peneliti: 1 org x 2 jam per minggu x 4 minggu x 6 bulan x Rp.50.000	2.400.000
	b. Honor anggota peneliti: 1org x 2 jam per minggu x 4 minggu x 6 bulan x Rp.35.000	1.680.000
	c. Honor pengolah data	1.000.000
	Sub Jumlah 1	5.080.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan	
	1. Kertas: 2 rim x Rp.50.000	100.000
	2. Toner printer: 1 bh x Rp.750.000	750.000
	Sub Jumlah 2	850.000
3	Perjalanan 4 kali ke lokasi penelitian x Rp110.000	440.000
	Sub Jumlah 3	440.000

Lampiran 5 : Biodata Peneliti

1. Biodata Ketua Peneliti

1	Nama Lengkap	Dr. Irawaty Igrisa, S.Pd.,M.Si (P)
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19710928 200604 2001
5	NIDN	0028097104
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 28 September 1971
7	Alamat Rumah	Jalan Prof.Dr. Jhon Ario, Nomor 74, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks/HP	(0435) 8709000 / ira.igrisa@yahoo.co.id
9	Alamat Kantor	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	0435 821125/0435 821752
11	Alamat E-mail	ira.igrisa@yahoo.co.id
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1 = 86 orang
13. Mata Kuliah yang diampu		1. Administrasi Pembangunan (S3)
		2. Manajemen Stratejik (S1)
		2. Administrasi Publik (S1 dan DIII)
		3. Ekonomi Kebijakan Publik (S1)
		4. Kepemimpinan (S1)

	5. Metodologi Penelitian (S1)
	6. Etika Administrasi Negara (S1)

a. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STKIP Negeri Gorontalo	Universitas Hasanudin Makassar	Universitas Negeri Makassar
Bidang Ilmu	Pendidikan Dunia Usaha- Akuntansi	Administrasi Pembangunan	Administrasi Publik
Tahun Masuk-Lulus	1991-1995	2002-2004	2007-2011
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Manajemn Usaha pada Perusahaan Kapur Kramat Gorontalo	Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT PG Rajawali Tolangohula Gorontalo	Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Tani dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Ternak di Kabupaten Gorontalo
Nama Pembimbing/Promotor	1. Drs. Rukunudin Olii. 2. Drs. Saleh Badaru.	1. Prof.Dr. Paembonan MS 2. Prof.Dr. Hasanuddin Fatsah MPd	1. Prof.Dr. Mappa Nasrun M.A 2. Prof.Dr. Jasruddin, MSi Dr.Isa Syamsu, M.Pd

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2008	Analisi Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja Karyawan, Juli 2008	Mandiri	-
2	2010	Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Tani di Kabupaten Gorontalo, Agustus 2010	Mandiri	
3	2011	Kebijakan Pendidikan Dasar di Kota Gorontalo, Juni 2011	FEB UNG	50.000
4	2011	Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan usaha tani di Kabupaten Gorontalo, Juli 2011	LEMLIT	8.500.000

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2010	Pelatihan Protokoler bagi mahasiswa, Juli 2010	PNBP	5.000.000
2	2011	Pelatihan Teknik Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru-guru SD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, September 2011	FEB UNG	5.000.000

d. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Jurnal tentang mewujudkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	Edisi 14 nomor 3/September 2008	Administrasi Negara STIA LAN Makassar
2	Jurnal tentang implementasi kebijakan pengembangan usaha tani ternak .	Edisi 3 nomor 2/ Maret 2010	Administrasi Negara STIA LAN Makassr
3.	Jurnal tentang kebijakan pendidikan dasar di Kota Gorontalo	Edisi 2 Desember 2011	Inovasi Univ. Negeri Gorontalo

e. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

f. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Kebijakan publik dan pengembangan usaha tani	2011	120	Mandiri Publishing Gorontalo.

g. Pengalaman Peroleh HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

h. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

i. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Pengembangan Program Studi tahun 2012.

Gorontalo, Oktober 2012

Ketua Tim Pengusul,

Dr. Irawaty Igrisa, S.Pd.,M.Si

NIP. 19710928 200604 2001

2. Biodata Anggota Peneliti

1	Nama Lengkap	Ramlan Amir Isa, SE.,MM (L)
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	Sekretaris Jurusan Manajemen
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19750828 200604 1001
5	NIDN	00280087507
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 28 Agustus 1975
7	Alamat Rumah	Jalan Yos Sudarso, Nomor 134, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks/HP	(0435) 8709000 / 081333844406
9	Alamat Kantor	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	0435 821125/0435 821752
11	Alamat E-mail	ramlanisa@rocketmail.com
12	Lulusan yang telah dihasilkan	
13. Mata Kuliah yang diampu		1. Manajemen Pemasaran (S1)
		2. Pemasaran Global (S1)
		2. Pengantar Manajemen(S1 dan DIII)
		3. Pengantar Bisnis (S1 dan DIII)
		4. Studi Kelayakan Bisnis (S1)
		5. Sistem Informasi Manajemen (S1)

a. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNSRAT Manado	Universitas Brawijaya Malang	-
Bidang Ilmu	Manajemen Pemasaran	Manajemen Pemasaran	-
Tahun Masuk-Lulus	1994-2002	2007-2009	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Pada Perum Gorontalo Selatan	Analisis Efisiensi Pemasaran Jagung di Provinsi Gorontalo	-
Nama Pembimbing/Promotor	1. Petrus Tumade, SE., M.Si 2. Selvi Mandey SE.M.Si	1. Dr. Mintarti Rahayu, SE., MS. 2. Wahdiyat Moko.SE., MM	-

b. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2010	Pengaruh Faktor Motivasi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Karyawan P.T Bank Sulut Cabang Gorontalo, September 2010	Feb UNG	5000.000

2	2011	Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan usaha tani di Kabupaten Gorontalo, Juli 2011	LEMLIT	8.500.000
---	------	--	--------	-----------

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2011	Pelatihan Teknik Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru-guru SD di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, September 2011	FEB UNG	5.000.000

d. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Jurnal tentang Analisis Efisiensi Sistem Pemasaran Jagung di Provinsi Gorontalo (Studi Kasus pada Sentra produksi Jagung di Kabupaten Pohuwato)	Volume 9/ Nomor 4/ Juli 2011	Jurnal Aplikasi Manajemen

9. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

10. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Enterpreneural Goverment	2011	70	Mandiri Publishing Gorontalo.

11. Pengalaman Peroleh HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

12. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

i. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Pengembangan Program Studi tahun 2012

Gorontalo, Oktober 2012

Pengusul,

Ramlan Amir Isa, SE., MM

NIP. 19750828 200404 1001S

Lampiran 6 : Rekomendasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kotak Pos 5 Gorontalo

Nomor : 28 /H47.B8/JM/LL/2012

Lamp. : 1 Eksamplar

Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Penelitian

Universitas Negeri Gorontalo

Di

Gorontalo

Dengan Hormat,

Berdasarkan Panduan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Pengembangan Program Studi/Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012, maka melalui surat ini kami informasikan bahwa Laporan Hasil Penelitian yang berjudul

1. **Studi implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Gorontalo**, yang dilaksanakan oleh Dr. Irawaty Igrisa, SPd, Msi dan Ramlan Amir Isa, SE, MM
2. **Pengaruh karakteristik sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial organisasi pada Universitas Negeri Gorontalo** yang telah dilaksanakan oleh La Ode Rasuli, SPd, MSA dan Amir Lukum, SPd, MSA

Telah diseminarkan ditingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo pada hari Senin, 24 September 2012 di Gedung Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 24 September 2012

Dekan FEB,

Imran R. Hambali, SPd, SE, MSA

NIP. 19700823 199903 1005

Lampiran 7 : Daftar Hadir Seminar Hasil Penelitian di tingkat Fakultas



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kotak Pos 5 Gorontalo

DAFTAR HADIR
SEMINAR HASIL PENELITIAN
PENGEMBANGAN PRODI TAHUN 2012
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
HARI / TANGGAL : SENIN, 24 SEPTEMBER 2012

NO	NAMA	JURUSAN/PRODI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.

14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

Gorontalo, 24 September 2012

Dekan FEB,

Imran R. Hambali, SPd, SE, MSA

NIP. 19700823 199903 1005

